



**BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI**

● ● ●

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

● ● ●

**SEKRETARIAT
BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan perwujudan penyelenggaraan *clean government* dan *good governance*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 berisikan program dan kegiatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun 2022. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2022 juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran serta uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2023

SEKRETARIS
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

PANDU YUNianto, ATD., M.Eng. Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

	PERSETUJUAN	TANGGAL	PARAF
1	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI		
2	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA USAHA		
3	KEPALA BAGIAN HUKUM, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
4	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA		

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan perwujudan penyelenggaraan *clean government* dan *good governance*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 berisikan program dan kegiatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun 2022. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2022 juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran serta uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2023

SEKRETARIS
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

PANDU YUNianto, ATD., M.Eng. Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melaksanakan kegiatan pokok seperti yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yaitu dalam bentuk Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Keberhasilan capaian kinerja diukur berdasarkan tingkat capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Kebijakan Transportasi. IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari 11 (delapan) indikator yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) sasaran kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

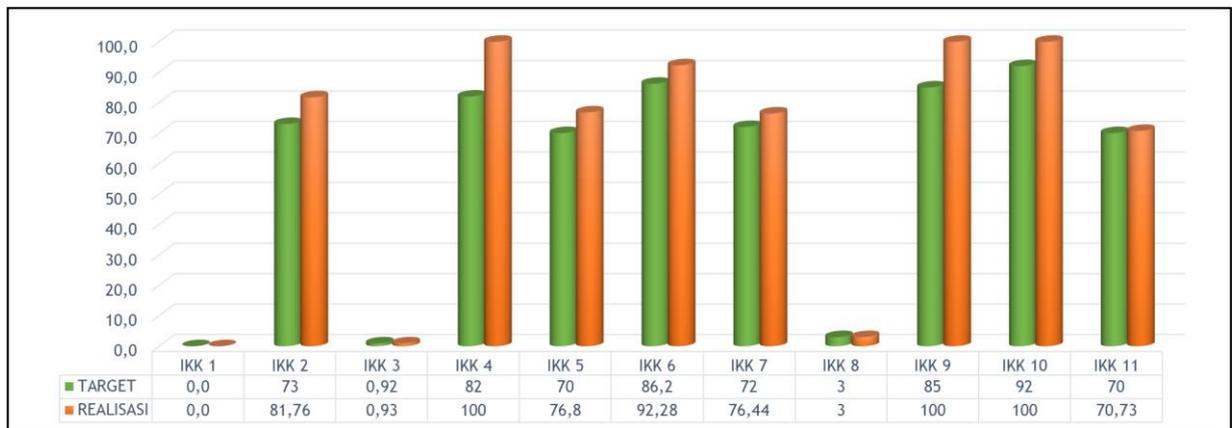
A. Pencapaian Kinerja

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 cukup baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,54%. Dari sebelas IKK seluruhnya telah melampaui target kinerja yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022. Gambaran kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dari tiap indikator selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. IKK 1 yaitu Indeks Kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan telah ditetapkan perubahan susunan organisasi Kemenhub yang awalnya terdapat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan saat ini menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Dengan adanya transformasi unit kerja ini, Evaluasi Kelembagaan belum dapat dilakukan di tahun 2022. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2022 belum bisa dilakukan penilaian indeks kelembagaan.
2. IKK 2 yaitu Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 ditargetkan pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 73 sampai dengan akhir tahun 2022 memperoleh realisasi sebesar 81,76 sehingga capaian kinerja untuk IKK 2 adalah sebesar 112,00%;
3. IKK 3 yaitu Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada tahun 2022 memperoleh nilai indeks sebesar 0,92 telah terealisasi di tahun 2022 sebesar 0,93 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101,14%;
4. IKK 4 yaitu Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi telah diperoleh nilai indeks sebesar 100 telah melampaui target tahun 2022 yaitu sebesar 82 sehingga capaian kinerja IKK 4 yaitu sebesar 121,95 %;
5. IKK 5 yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kebijakan Transportasi yang dalam pengukuran capaian indikator ini mengacu pada nilai dari Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) telah terealisasi sebesar 76,80 telah melampaui target tahun 2022 yaitu sebesar 70 dengan capaian kinerja 109,71%;

6. IKK 6 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 86,2 sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar 92,28 sehingga capaian kinerja untuk IKK 6 adalah sebesar 107,05%;
7. IKK 7 yaitu Indeks Penyelenggaraan Perkantoran pada tahun 2022 ditargetkan pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 72 sampai dengan akhir tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 76,44 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 106,17%;
8. IKK 8 yaitu Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Kebijakan Transportasi dengan target pada level 3 sampai dengan akhir tahun 2022 diperoleh realisasi pada level 3 sehingga capaian kinerja IKK 8 sebesar 100%;
9. IKK 9 yaitu Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada tahun 2022 dapat mencapai sebesar 85% dan telah terealisasi sebesar 100% pada akhir tahun 2022 sehingga capaian kinerja sebesar 117,65%;
10. IKK 10 yaitu Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data telah terealisasi sebesar 92% dengan target di tahun 2022 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 108,70%;
11. IKK 11 yaitu Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi ditargetkan pada tahun 2022 dapat mencapai 70% sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar 70,73% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 101,04%.

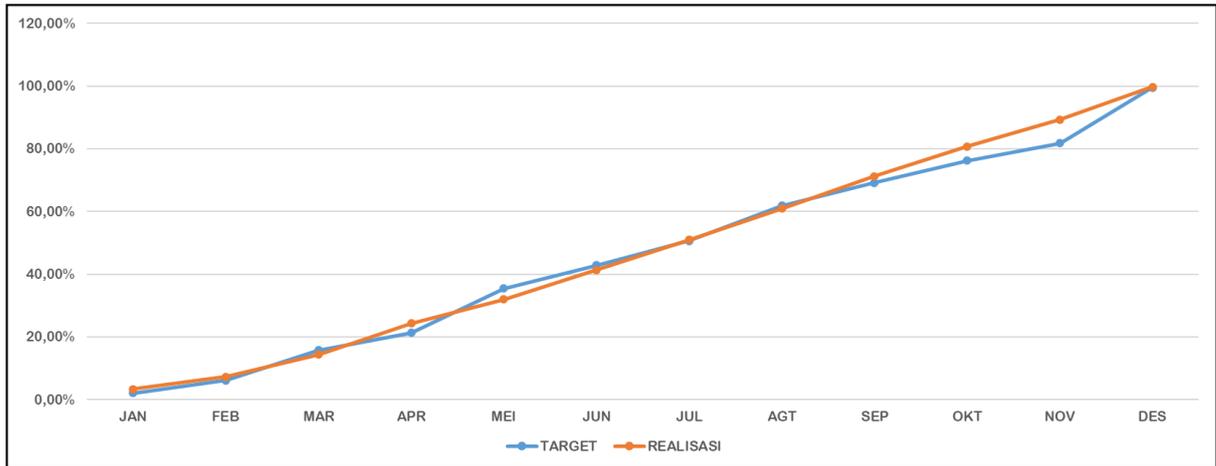
Capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022

B. Kinerja Anggaran

Secara umum realisasi serapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 sangat baik. Sisa belanja barang berasal dari sisa perjalanan dan honor jasa profesi serta sisa belanja pegawai dikarenakan adanya kelebihan perhitungan gaji dan tunjangan kinerja untuk pegawai disebabkan adanya mutasi pegawai dan pensiun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik daya serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berikut di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Daya Serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 TUGAS DAN FUNGSI	2
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA	2
I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	3
I.5 SISTEMATIKA LAPORAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	6
II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022	8
II.3 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
III.1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	14
III.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	14
III.3. REALISASI ANGGARAN	62
BAB IV PENUTUP	66
IV.1 KESIMPULAN	66
IV.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT	66
L A M P I R A N	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020 – 2024	7
Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Berdasarkan Output Tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	10
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022.....	15
Tabel 3. 2 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi	16
Tabel 3. 3 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi	18
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kelembagaan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	19
Tabel 3. 5 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Kelembagaan Tahun 2022.....	20
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	22
Tabel 3. 7 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2022	23
Tabel 3. 8 Hasil Perhitungan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2022.....	24
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	25
Tabel 3. 10 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2022	25
Tabel 3. 11 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kapasitas dukungan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang transportasi	26
Tabel 3. 12 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan.....	27
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Perencanaan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	28
Tabel 3. 14 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Perencanaan Tahun 2022 ...	29
Tabel 3. 15 Tabel Penjelasan Indikator Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	31
Tabel 3. 16 Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan Tahun 2022.....	32
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	33
Tabel 3. 18 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	34

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	37
Tabel 3. 20 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022	37
Tabel 3. 21 Perhitungan Pengambilan Sampel Responden menggunakan Rumus <i>Slovin</i> dan Realisasi Responden	39
Tabel 3. 22 Skor Skala <i>Likert</i>	39
Tabel 3. 23 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran dengan Analisis Skala <i>Likert</i>	40
Tabel 3. 24 Interval Interpretasi Skor	40
Tabel 3. 25 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Masing-masing Aspek Penilaian.....	41
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	42
Tabel 3. 27 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2022	42
Tabel 3. 28 Tingkatan Level Maturitas SPIP.....	43
Tabel 3. 29 Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022	44
Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	45
Tabel 3. 31 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2022	46
Tabel 3. 32 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan...	46
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	47
Tabel 3. 34 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Tahun 2022.....	48
Tabel 3. 35 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik.....	48
Tabel 3. 36 Daftar Aplikasi dan Data Tahun 2022	49
Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	50
Tabel 3. 38 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2022.....	50
Tabel 3. 39 Skor Pembobotan Tingkat Publikasi.....	51
Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	52

Tabel 3. 41 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Publikasi Tahun 2022	53
Tabel 3. 42 Target dan Realisasi Capaian Rincian <i>Output</i> Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022	55
Tabel 3. 43 Tingkat Penyerapan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 per Bulan	56
Tabel 3. 44 Perhitungan Skalia Efisiensi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022	57
Tabel 3. 45 Rencana Penarikan Dana Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 per Bulan	58
Tabel 3. 46 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran per Bulan Tahun 2022.....	59
Tabel 3. 47 Nilai Variabel Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022	60
Tabel 3. 48 Perkembangan Anggaran Tahun 2018-2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	62
Tabel 3. 49 Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2022	64
Tabel 3. 50 Capaian Daya Serap Kegiatan Tahun 2020	64
Tabel 3. 51 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022	iii
Gambar 2. Grafik Daya Serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022.....	iv
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.....	1
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon III.....	2
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	2
Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	3
Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	9
Gambar 2. 2 Perjanjian Kerja Awal Tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	12
Gambar 2. 3 Perjanjian Kerja Revisi I Tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	13
Gambar 3. 1 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Kebijakan Transportasi	21
Gambar 3. 2 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	27
Gambar 3. 3 Nilai Kinerja Anggaran dan IKPA Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022	36
Gambar 3. 4 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan	54
Gambar 3. 5 Piagam Penghargaan Juara ke-2 Lomba Konten UPT	61
Gambar 3. 6 Pemberian apresiasi pemenang Lomba oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenkomarvest.....	61
Gambar 3. 7 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2018 – 2022	62
Gambar 3. 8 Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2018-2022	63
Gambar 3. 9 Kurva S - Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Setbadan Litbang	63

LAMPIRAN

Lampiran 1	68
Lampiran 2	70

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean government and good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan wajib untuk disiapkan, disusun, disampaikan secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKIP disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengacu pada Permen PAN-RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2022, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Tugas utama yang sebelumnya adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perhubungan dengan output hasil penelitian berubah menjadi menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan masukan penyempurnaan kebijakan transportasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

Perubahan tugas pokok dan fungsi ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dengan adanya perubahan organisasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi maka terjadi perubahan juga pada Unit Kerja dibawahnya. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang sebelumnya adalah Sekretariat Badan Litbang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perhubungan. Karenanya maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Eselon II Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi selaku Pemberi Mandat atas pencapaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan;

- b. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan manajemen teknisnya dalam penyelenggaraan program kegiatan;
- c. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

I.2.1 Tugas

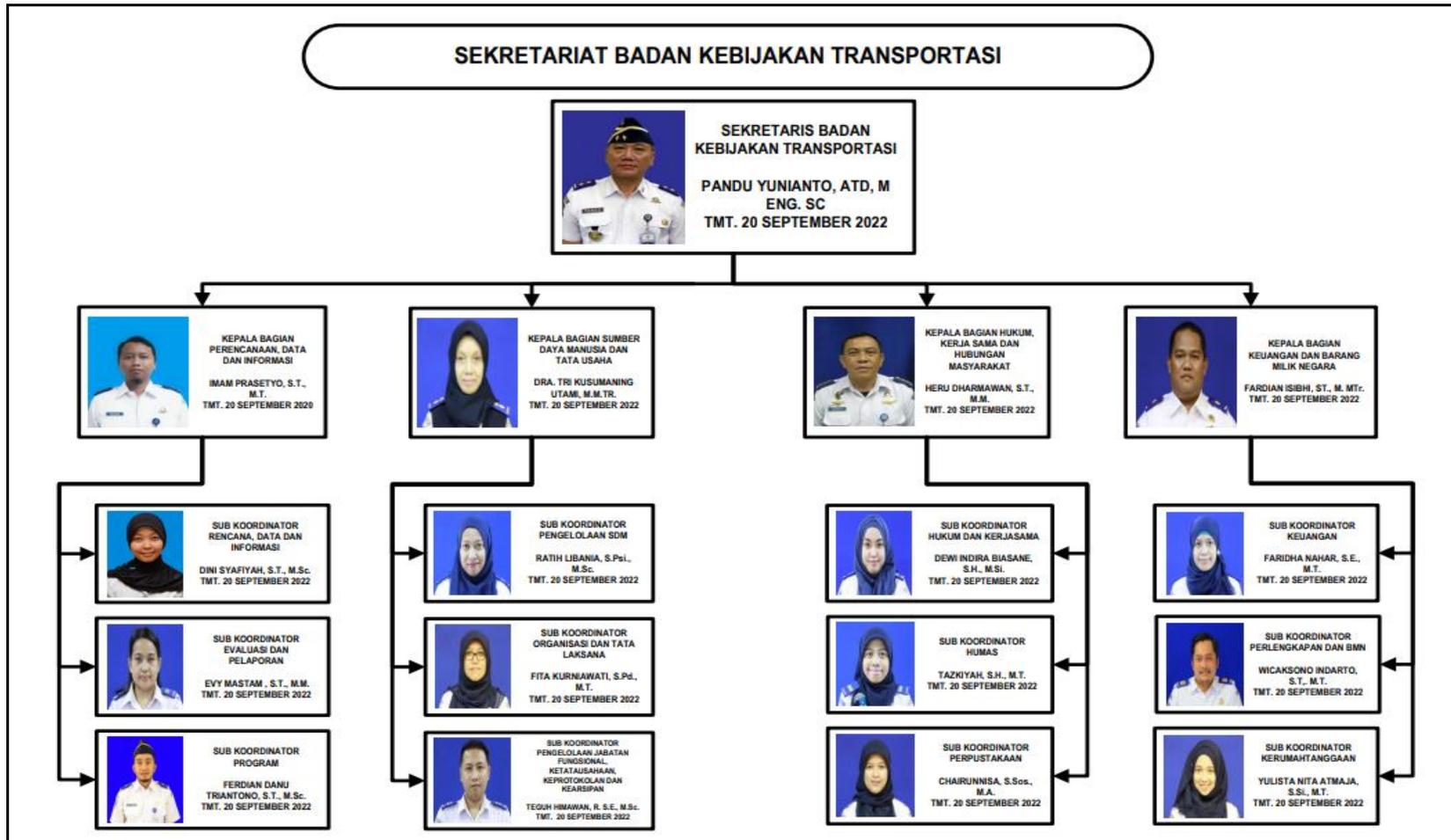
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Sekretaris Badan, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

I.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Rencana, Program, Anggaran, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- b. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatausahaan, Serta Pengelolaan Jabatan Fungsional di Bidang Analisis Kebijakan dan Kepustakaan;
- c. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Hukum, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Publikasi, Serta Dokumentasi Dan Kepustakaan; dan
- d. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Serta Kerumahtanggaan.

Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melingkupi 4 (empat) unit kerja Eselon III yang terdiri dari (1) Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; (2) Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; (3) Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan (4) Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. Apabila digambarkan maka struktur organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan PM 17 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



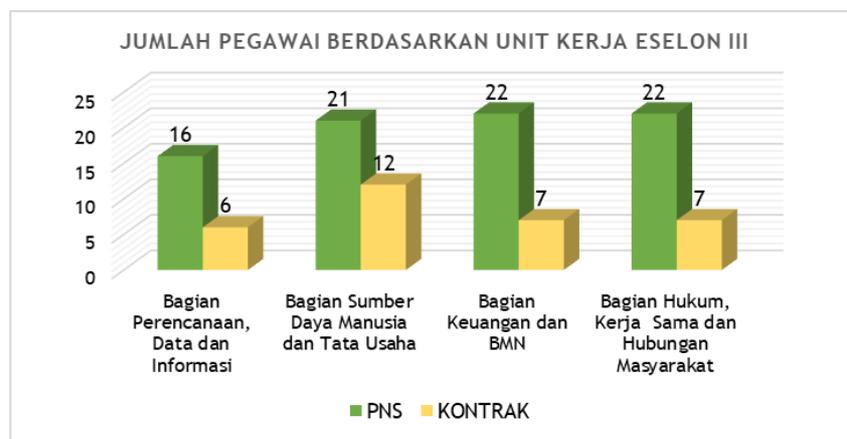
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Komposisi pegawai PNS Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan unit kerja eselon III, tingkat pendidikan serta golongan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Unit Kerja Eselon III

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2022 yaitu 113 pegawai yang terdiri dari 81 orang PNS dan 32 orang Pegawai Kontrak. Seluruh pegawai ini tersebar pada empat unit kerja eselon III. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan unit kerja ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut:

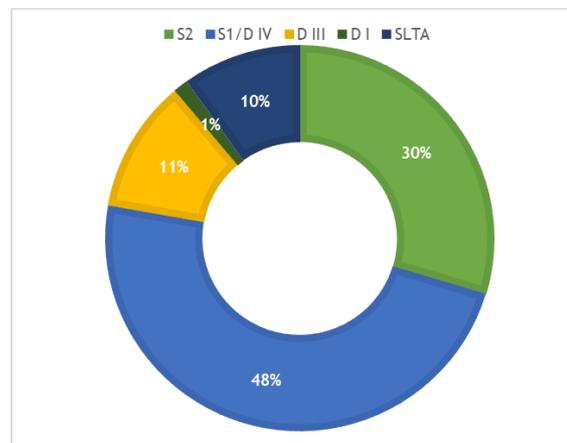


Sumber: Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha, Desember 2022

Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon III

2. Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menurut tingkat pendidikan, yaitu S2 sebanyak 24 orang, S1/D IV sebanyak 39 orang, D III sebanyak 9 orang, DI sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 8 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.

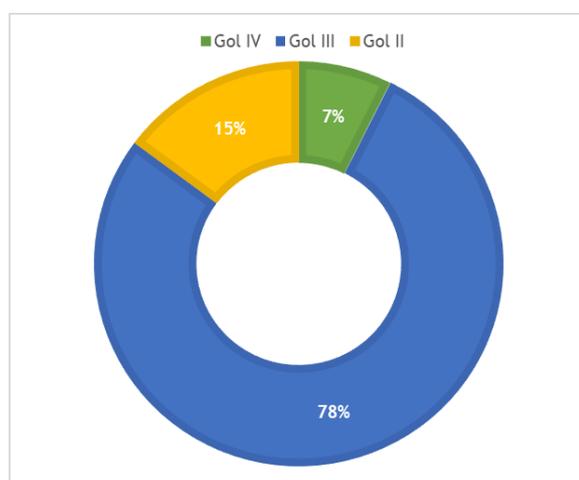


Sumber: Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha, Desember 2022

Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

3. Berdasarkan Golongan

Sedangkan berdasarkan golongan tercatat pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari Golongan IV sebanyak 6 pegawai atau 7%, Golongan III sebanyak 63 pegawai atau 78%, dan Golongan II sebanyak 12 pegawai atau 15%. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada Gambar 1.4. berikut.



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Desember 2022

Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Pada tahun 2022, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Tugas utama yang sebelumnya adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perhubungan dengan output hasil penelitian berubah menjadi menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan masukan penyempurnaan kebijakan transportasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

Perubahan tugas pokok dan fungsi ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Berangkat dari Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi selanjutnya ditetapkan peran dan fokus kegiatan Badan Kebijakan Transportasi ke depan untuk kurun waktu 2020-2024. Adapun peran Badan Kebijakan Transportasi ke depannya diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi dan tugas Badan Kebijakan Transportasi dalam penyusunan dan perumusan kebijakan transportasi. Sedangkan fokus kegiatan Badan Kebijakan Transportasi meliputi penjabaran peran Badan Kebijakan Transportasi terkait dengan fungsi pelayanan Badan Kebijakan Transportasi. Peran Badan Kebijakan Transportasi kedepannya diharapkan dapat dioptimalkan dan diarahkan sebagai:

1. Lembaga yang menyusun kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
2. Lembaga pelaksana analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
3. Lembaga pelaksana analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi;

4. Lembaga pengelola manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
5. Lembaga pelaksana pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
6. Lembaga pelaksana pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
7. Lembaga pelaksana administrasi Badan Kebijakan Transportasi; dan
8. Lembaga pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi meliputi kegiatan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi dan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sementara itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi lebih bersifat internal dan bersifat dukungan manajemen, yaitu meliputi kegiatan pokok penyiapan rencana, program, anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data dan sistem informasi, penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan ketatausahaan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang analisis kebijakan dan kepustakaan, penyiapan pelaksanaan urusan hukum, kerjasama, hubungan masyarakat, publikasi, serta dokumentasi dan kepustakaan; serta penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta kerumahtanggaan.

Pelaksanaan sebagian besar kegiatan di Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan capaian dari kegiatan dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan dan pengembangan perhubungan.

Dalam hal ini, peran strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai koordinator pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, yaitu meliputi kegiatan penunjang serta pembinaan. Kegiatan pembinaan khususnya sumber daya manusia meliputi tenaga fungsional tertentu serta kegiatan penunjang yang terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung rekomendasi kebijakan.

I.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan penekanan kepada potensi, sumber daya manusia, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

BAB II – Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan/ ikhtisar rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022, yaitu terdiri dari:

a. Analisis Capaian Kinerja

Menguraikan secara sistematis pencapaian kinerja pada tahun 2022, pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rentang waktu beberapa tahun, perbandingan antara realisasi dan target dalam dokumen renstra, analisis keberhasilan/ kegagalan dan hambatan/ kendala capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

Menguraikan pemanfaatan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi beserta analisis anggaran tidak terserap.

BAB IV – Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu, terdapat peraturan turunan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022. Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan tersebut, Rencana strategis (Renstra) Badan Kebijakan Transportasi telah disusun dan disahkan pada bulan Desember tahun 2022 .

Sedangkan, Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 masih dalam tahap penyusunan sehingga yang menjadi dasar analisa capaian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 adalah Indikator Kinerja (IK) yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

Berikut ini merupakan gambaran visi dan misi serta tujuan dari Badan Kebijakan Transportasi sebagai organisasi baru yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Nantinya, dalam menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi akan mengacu kepada visi dan misi serta tujuan dari Badan Kebijakan Transportasi ini yang disusun berdasarkan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Berikut ini Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi dalam dokumen Renstra Badan Kebijakan Transportasi:

VISI

“Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (center of excellence) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

MISI

Sebagai penjabaran visi tersebut maka misi Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan **harmonisasi** kebijakan transportasi secara **holistik, integratif, tematik, spasial (HITS)**;
2. Meningkatkan **kualitas** rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (**evidence and knowledge based policy**);
3. Meningkatkan **peran serta pemangku kepentingan** dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
4. Membangun **bisnis proses** yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi;

5. **Penguatan** SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

TUJUAN

1. Terwujudnya peran sentral Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi
2. Terwujudnya dukungan Badan Kebijakan Transportasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.

Menindaklanjuti perubahan organisasi yang baru, Renstra Badan Kebijakan Transportasi baru disahkan pada bulan Desember tahun 2022. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 masih mengacu pada Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024 sehingga dalam pengukuran pencapaian sasaran masih menggunakan indikator lama namun telah menghilangkan fungsi kelitbangan. Untuk itu, dalam pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran kegiatannya, setiap sasaran yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi;
2. Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel;
3. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan;
4. Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik.

Secara rinci penjabaran indikator kinerja berikut targetnya sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Indeks Kelembagaan	Nilai	78	78,5	79	79,5	80
IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	71	72	73	74	75
IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Nilai	0,8	0,9	0,92	0,96	1
IKK 4	Indeks Perencanaan	Nilai	78	80	82	84	85
IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	60	65	70	75	80
IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan	Nilai	80,2	84,2	86,2	88,2	90,2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	70	71	72	73	74
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3
IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan	%	80	82	85	86	87
IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90	90	92	92	93
IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi	%	70	70	70	75	75

Selanjutnya target kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan awal sebagai dasar penentuan target untuk penyusunan perjanjian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu. Penyusunan target perjanjian kinerja dalam hal ini mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun tersebut.

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Rencana kinerja ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengalokasian sumber daya, terutama anggaran.

Pada tahun 2022, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 72.869.932.000,- dari total pagu alokasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi Rp. 174.302.325.000,-. Pada bulan Juli dalam rangka optimalisasi kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2022 terdapat revisi anggaran pada anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sehingga anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 menjadi sebesar Rp69.865.636.000,-. Setelah pengesahan realokasi anggaran ke Babun, DIPA akhir Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menjadi Rp65.421.497.000,-. Rincian anggaran meliputi anggaran belanja pegawai sebesar Rp30.945.758.000,-, belanja barang Rp31.929.656.000,-, dan belanja modal sebesar Rp2.546.083.000,-. Dalam hal ini, dokumen RKT Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 2022 sebagaimana disajikan pada **Lampiran III** menjadi dasar penentuan alokasi anggaran tahun 2022.



**RESUME RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan	IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	79
		IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	73
		IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,92
2	Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel	IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	82
		IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	70
		IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	86,2
		IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	72
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	
3	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	85
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	92
		IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70

Jakarta, 2021

SEKRETARIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

PANDU YUNIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Pada tahun 2022 dengan adanya restrukturisasi program Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2022 berimplikasi terhadap restrukturisasi output dan kegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut. Restrukturisasi output ini pada tahun 2022 sudah mulai diakomodir dengan adanya penyusunan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA RENJA) melalui penyederhanaan output dimana beberapa output lama dikelompokkan menjadi output baru. Secara rinci pemetaan kegiatan output baru dan output lama dapat dilihat Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Berdasarkan Output Tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.068.565.000
2. Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset Kebijakan	2. Layanan Dukungan Manajemen Internal	2. Layanan Administrasi Barang Milik Negara	1.359.410.000
		3. Layanan Administrasi, Perlengkapan dan Kerumahtanggan	1.832.104.000
		4. Layanan Perkantoran	48.790.806.000
	3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5. Layanan Sarana Internal	3.318.243.000
	4. Layanan Manajemen Kinerja Internal	6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.340.470.000
		7. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	935.003.000
		8. Layanan Manajemen Keuangan	1.830.373.000
		9. Layanan Penataan Dokumen Tata Usaha	526.478.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan	5. Layanan Dukungan Manajemen Internal	10. Layanan Hubungan Masyarakat	2.306.668.000
		11. Layanan Data dan Informasi	557.516.000
TOTAL			69.865.636.000

II.3 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, telah disusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang berisikan target kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang akan dicapai pada tahun 2022. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak kerja antara Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Pada tahun 2022, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyusun sebanyak 2 (dua) dokumen Perjanjian Kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja awal yang disusun pada bulan Januari 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp72.869.932.000,- yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.;
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja revisi I yang disusun pada bulan September 2022 dikarenakan adanya transformasi kelembagaan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi serta adanya *refocusing* anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp69.865.636.000,- yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Revisi I inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB tahun 2022 ini.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan	IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	79
		IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	73
		IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,92
2	Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel	IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	82
		IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	70
		IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	86,2
		IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	72
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
3	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	85
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	92
		IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan | Rp. 3.068.565.000,00 |
| 2. Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Riset Kebijakan | Rp. 66.937.183.000,00 |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan | Rp. 2.864.184.000,00 |

Disetujui,
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan

Dr. UMAR ARIS, S.H. M.M., M.H.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630220 198903 1 001

Jakarta, **05** Januari 2022
Sekretaris
Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan

PANDU YUNIANTO, ATD., M.Eng. Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

Keterangan : Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) masih menunggu Peraturan Presiden.

Gambar 2. 2 Perjanjian Kerja Awal Tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi	IKK 1	Indeks Kelembagaan	Nilai	79
		IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	73
		IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Nilai	0,92
2	Meningkatnya Birokrasi Akuntabel	IKK 4	Indeks Perencanaan	Nilai	82
		IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	70
		IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan	Nilai	86,2
		IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	72
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
3	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan	%	85
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	92
		IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi	%	70

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan | Rp. 3.068.565.000,00 |
| 2. Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Riset Kebijakan | Rp. 63.932.887.000,00 |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan | Rp. 2.864.184.000,00 |

Disetujui,
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Jakarta, September 2022
Sekretaris
Badan Kebijakan Transportasi


Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002


PANDU YUNianto, ATD., M.Eng. Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

Gambar 2. 3 Perjanjian Kerja Revisi I Tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Tahapan pengukuran kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, yaitu *e-performance* dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring capaian kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, II, dan III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya.

Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian realisasi target *output* kegiatan, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyusun laporan Rencana Aksi Kinerja Bulanan Laporan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam bentuk kertas kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang disusun setiap bulanan. Data isian capaian kinerja perbulan dalam hal ini menjadi dasar pengerjaan laporan Rencana Aksi Kinerja bulanan. Di samping Laporan Rencana Aksi Kinerja, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Evaluasi Program setiap triwulan sebagai bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran.

Monitoring capaian kinerja *output* kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara, Kemenkeu melakukan monitoring capaian target dan proses output/kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>. Sedangkan, Bappenas sendiri melalui pemanfaatan aplikasi e-monev penerapan PP 39 Tahun 2006 dengan alamat <http://e-monev.bappenas.go.id/emon3> dalam bentuk monitoring realisasi target anggaran dan output kegiatan.

III.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran sebagaimana telah ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Revisi I Tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022 dengan realisasinya.

Adapun tahapan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Revisi PK Tahun 2022 dan Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target ditahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

III.2.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020 – 2024, terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan sebagai upaya pencapaian program Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang dijabarkan menjadi 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan. Secara rata-rata capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 adalah sebesar 108,54% yang dihitung dari capaian seluruh indikator Sekretariat Badan Libang Perhubungan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi	IKK 1	Indeks Kelembagaan	Nilai	79	N/A	N/A
		IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	73	81,76	112,00
		IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Transportasi	Nilai	0,92	0,93	101,14
2	Meningkatnya Birokrasi Perhubungan Akuntabel	IKK 4	Indeks Perencanaan	Nilai	82	100	121,95
		IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	70	76,80	109,71
		IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan	Nilai	86,2	92,28	107,05
		IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	72	76,44	106,17

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	100,00
3	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan	%	85	100	117,65
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	92	100	108,70
		IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi	%	70	70,73	101,04
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							108,54

Keterangan* : Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri

Secara rinci, analisis realisasi capaian dan target tahun 2022 pada masing-masing sasaran dan indikator disajikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi

Pencapaian sasaran kegiatan pertama diwujudkan melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3. 2 Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2022	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 1	Indeks Kelembagaan	Nilai	79	N/A	N/A
IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	73	81,76	112,00
IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Nilai	0,92	0,93	101,14

Keterangan* : Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri

IKK 1 : Indeks Kelembagaan

Perhitungan indikator kinerja indeks kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan pada Permenpan & RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Indeks dihitung berdasarkan hasil rata-rata survey pada instansi pemerintah dengan sampel dua tingkatan organisasi yakni tingkatan tertinggi dan tingkatan di bawah tingkatan tertinggi.

Perkembangan isu strategis terkait kebutuhan penguatan peran dan rencana reformasi fungsi unit penelitian dan pengembangan yang ada di setiap instansi pemerintahan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi. Mengacu pada Permenpan & RB Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan evaluasi kelembagaan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap unit kerja. Kuesioner yang disampaikan merupakan alat ukur yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan terkait evaluasi kelembagaan. Metode tahapan evaluasi kelembagaan meliputi:

a. **Persiapan**

Pada tahapan ini adalah dilakukan penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan;

b. **Pengumpulan Data Responden**

Responden yang melaksanakan pengisian kuisisioner evaluasi pada setiap unit kerja dibawahnya;

c. **Pelaksanaan Pengisian Kuisisioner**

Pengisian kuisisioner dilakukan oleh setiap responden berdasarkan kondisi lingkungan organisasi masing-masing. Mekanisme pelaksanaan dapat menggunakan dokumen *hardcopy* maupun *softcopy* melalui fasilitasi pengisian kuisisioner secara *online*.

d. **Pengolahan Data: Penghitungan Nilai, Bobot dan Konversinya**

Analisis pengolahan data dilakukan dengan melakukan penghitungan nilai, bobot dan konversinya berdasarkan Pedoman Evaluasi Kelembagaan yang telah ditetapkan dalam PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018. Terdapat sebanyak 66 (enam puluh enam) pertanyaan instrumen yang dikelompokkan dalam dua dimensi dan delapan sub dimensi. Adapun setiap pertanyaan memiliki nilai jawaban yang menggunakan pendekatan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Untuk perhitungan nilai dari jawaban yang dipilih telah ditetapkan bobot untuk masing-masing dimensi sesuai PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai konversinya.

e. **Pengkategorian Hasil Perhitungan**

Pengkategorian hasil perhitungan evaluasi dilakukan sesuai dengan hasil penilaian dan perhitungan nilai, bobot dan konversinya. Selanjutnya hasil perhitungan akhir disajikan menyeluruh dalam bentuk peringkat komposit (P). Peringkat komposit menyajikan interpretasi terhadap hasil total skor dalam 5 (lima) kategori sebagaimana ditetapkan dalam PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Rentang nilai peringkat komposit berikut interpretasi dari setiap peringkat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81 - 100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61 - 80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41 - 60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21 - 40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.

PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0 – 20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.

Berdasarkan Peraturan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 yaitu Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan telah ditetapkan perubahan susunan organisasi Kemenhub yang awalnya terdapat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan saat ini menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Dengan adanya transformasi unit kerja ini, Evaluasi Kelembagaan belum dapat dilakukan di tahun 2022. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2022 belum bisa diperoleh nilai realisasi dan kinerja dari IKK 1.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Kelembagaan Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kelembagaan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 1	Indeks Kelembagaan	Nilai	79	N/A	80,52	80

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2022 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 1 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp600.793.000,- yang terdiri dari Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Strategis Bidang SDM dan Kelembagaan dan Anggaran Penataan Organisasi. Sampai akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp600.789.880,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp3.120,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Kelembagaan Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
	Indeks Kelembagaan		600.793.000	600.789.880	3.120	0,999995
IKK 1	1. Penyelenggaraan Kegiatan Strategis Bidang SDM dan Kelembagaan	1 Laporan	329.991.000	329.988.580	2.420	0,999993
	2. Penataan Organisasi	1 Laporan	270.802.000	270.801.300	700	0,999997

IKK 2 : Indeks Profesionalisme ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN telah diatur dalam peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikator ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.

Penilaian ini dilakukan terhadap seluruh ASN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2022. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:

- a. Pegawai ASN, dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN;
- b. Instansi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional ; dan
- c. Masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN ini berdasarkan 4 (empat) dimensi, yang disetiap dimensi mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN, yaitu antara lain:

- a. Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Indikator yang digunakan adalah jenjang Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata Tiga), S-2 (Strata Dua), S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat), D-III (Diploma Tiga), D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat, di bawah SLTA.

- b. Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya.
- c. Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
- d. Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang, dan Hukuman disiplin berat.

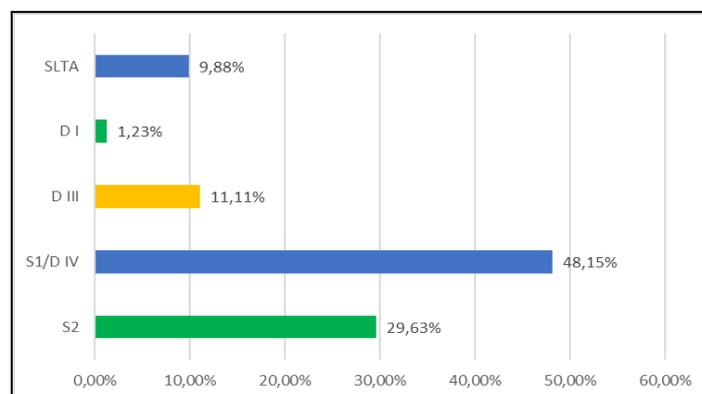
Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
- b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;
- c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
- d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
- e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Pada tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan penilaian mandiri untuk Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai Badan Kebijakan Transportasi. Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh hasil Indeks Profesionalitas ASN Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 adalah sebesar 81,76 telah melampaui target tahun 2022 yaitu sebesar 73 sehingga diperoleh capaian kinerja IKK 2 sebesar 112,00%. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN didapatkan dari hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan Badan Kebijakan Transportasi.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator ini, antara lain:

- a. Tingkat Pendidikan pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang sebagian besar telah berada pada jenjang Pendidikan S-2 (Strata Dua) dan S-1 (Strata Satu), yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha

Gambar 3. 1 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Kebijakan Transportasi

- b. Pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang setiap tahunnya selalu berpartisipasi aktif atau ikut serta dalam pengembangan kompetensi baik dalam bentuk Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya. Selain itu Badan Kebijakan Transportasi juga secara rutin setiap tahun menyelenggarakan berbagai Pendidikan dan Pelatihan untuk diikuti oleh pegawai Badan Kebijakan Transportasi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat;
- c. Kinerja pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang berdasarkan pada penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) rata-rata berada pada kriteria Sangat Baik dan Baik.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	73	81,76*	82,60*	75

Keterangan : Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2022 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Realisasi di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan jumlah pegawai dengan pendidikan S2 yang dimiliki Badan Kebijakan Transportasi menurun, selain itu juga karena jumlah pegawai yang diakui kompetensinya tidak sebanyak tahun lalu karena beberapa instansi pembina masih mensyaratkan diklat fungsional dasar untuk diakui.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 2 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp576.557.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp576.553.721,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp3.279,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
	Indeks Profesionalisme ASN		576.557.000	576.553.721	3.279	0,999994
IKK 2	1. Pengembangan Kompetensi Pegawai	1 Laporan	180.938.000	180.936.990	1.010	0,999994
	2. Pengembangan Motivasi Pegawai	1 Laporan	308.000.000	307.998.720	1.280	0,999996
	3. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	1 Laporan	87.619.000	87.618.011	989	0,999989

IKK 3 : Indeks Tata Kelola Manajemen ASN

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standard penilaian penerapan Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi. Penilaian Indeks Tata Kelola Manajemen ASN ini mengadopsi Penilaian Sistem Merit yang berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit pada Manajemen ASN dan Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, penilaian dilakukan oleh KASN terhadap seluruh Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan telah dimulai sejak Februari 2020.

Berdasarkan peraturan tersebut penilaian sistem merit hanya dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga dan tidak ada hasil penilaian di tingkat Unit Kerja Eselon I dari Kementerian/Lembaga sehingga untuk realisasi indikator ini Badan Kebijakan Transportasi melakukan penilaian mandiri.

Penilaian Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dilakukan berdasarkan penerapan 8 (delapan) aspek-aspek dengan menggunakan sistem skor dan bobot. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek. Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit. Skor sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan, antara lain:

- a. Kurang dengan skor 1, jika sebagian besar elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan;
- b. Cukup dengan skor 2, jika baru sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
- c. Baik dengan skor 3, jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
- d. Sangat baik dengan skor 4, jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas.

Berikut ini tabel hasil perhitungan mandiri Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi:

Tabel 3. 8 Hasil Perhitungan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2022

NO.	ASPEK	TOTAL BOBOT	BOBOT BALITBANG
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan Pegawai	40	40
2	Pengadaan Pegawai	40	40
3	Pengembangan Karir Pegawai	130	117,5
4	Promosi dan Mutasi Pegawai	40	40
5	Manajemen Kinerja Pegawai	80	80
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Pegawai	40	40
7	Perlindungan dan Pelayanan Pegawai	16	8
8	Sistem Informasi Pegawai	24	16
JUMLAH		410	381,5
INDEKS TATA KELOLA MANAJEMEN ASN: Jumlah Bobot Balitbang / Jumlah Total Bobot			0,93

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh realisasi Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi adalah sebesar 0,93 telah melampaui target tahun 2022 yaitu sebesar 0,92 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101,14%. Ketercapaian pada indikator ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Badan Kebijakan Transportasi secara rutin selalu melakukan pembaharuan data pegawai yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi selain itu Badan Kebijakan Transportasi setiap tahun telah melakukan analisis beban kerja sehingga telah tersedia peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai Badan Kebijakan Transportasi untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi No. 99 Tahun 2022 tentang kebutuhan PNS di Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024;
- b. Setiap tahun Badan Kebijakan Transportasi melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, sehingga setiap tahunnya dapat diselenggarakan diklat sesuai kebutuhan pegawai dan dapat mengatasi kesenjangan kompetensi serta kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- c. Pada tahun 2022 telah dilakukan pengadaan dan pengusulan *assessment* untuk jabatan struktural, sesuai dengan dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan kebijakan jabatan struktural secara terbuka dan kompetitif;
- d. Telah tersosialisasinya kebijakan internal tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi serta telah terlaksananya pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai Badan Kebijakan Transportasi dalam bentuk dokumen Laporan Unit Kepatuhan Internal yang disusun tiap triwulan.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Nilai	0,92	0,93	0,93	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2022 belum melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 3 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.085.752.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp3.085.737.600,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp14.400,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN		3.085.752.000	3.085.737.600	14.400	0,999995
	1. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	609.019.000	609.014.887	4.113	0,999993
	2. Penyelenggaraan Administrasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional	1 Laporan	518.181.000	518.179.215	1.785	0,999997
	3. Koordinasi Laporan Pembinaan dan Penghargaan Pegawai UKI dan P4GN	1 Laporan	194.406.000	194.404.345	1.655	0,999991
	4. Konsolidasi dan Koordinasi	1 Laporan	1.449.168.000	1.449.165.590	2.410	0,999998
	5. Reformasi Birokrasi	1 Laporan	151.197.000	151.194.523	2.477	0,999984
	6. Penyelenggaraan Kegiatan <i>Transhub Community</i>	1 Laporan	163.781.000	163.779.040	1.960	0,999988

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis kedua diwujudkan melalui 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 11 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kapasitas dukungan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang transportasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2022	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 4	Indeks Perencanaan	Nilai	82	100	121,95
IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	70	76,80	109,71
IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan	Nilai	86,2	92,28	107,05
IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	72	76,44	106,17
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	100,00

IKK 4 : Indeks Perencanaan

Indeks Perencanaan didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

Pengukuran Indeks Perencanaan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) dokumen perencanaan, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian sasaran/target Prioritas Nasional (PN). Manfaat dari indeks perencanaan ini adalah dapat mengetahui tingkat kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaannya.

Indikator Indeks Perencanaan ini merupakan indikator turunan dari indikator Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan yang merupakan indikator dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan diukur melalui 3 (tiga) aspek penilaian yaitu Integrasi Perencanaan (40%), Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (40%), dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%). Pengukuran Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi hanya mengukur aspek Integrasi Perencanaan dengan bobot (100%).

Indikator Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi memiliki target pada tahun 2022 yaitu sebesar 80 dan telah terealisasi pada tahun 2022 sebesar 100 sehingga diperoleh capaian

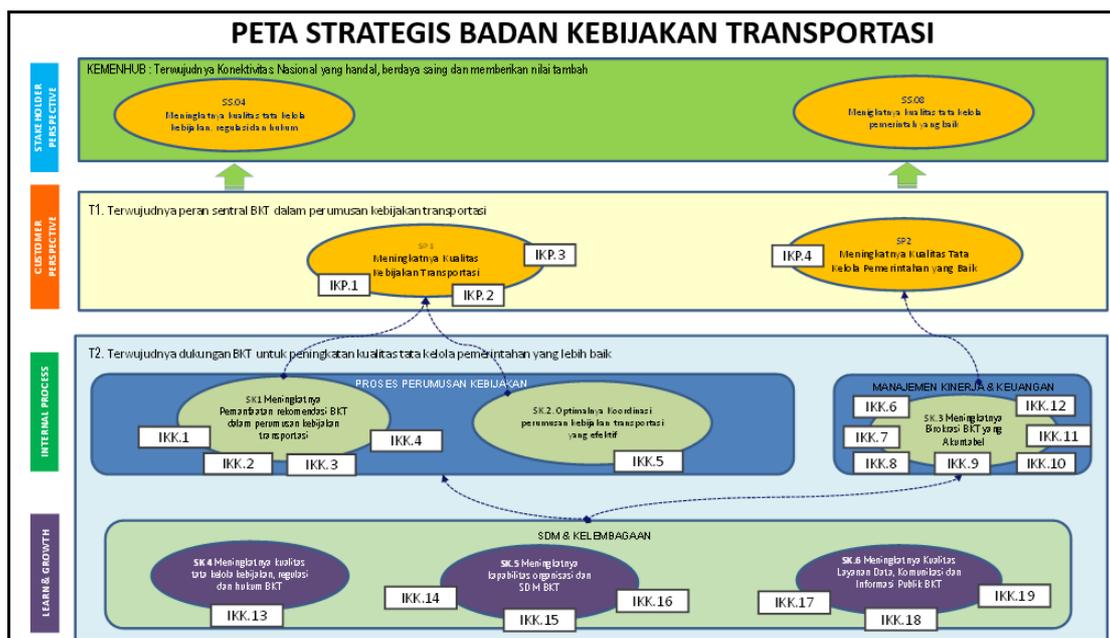
kinerja IKK 4 yaitu sebesar 121,95%. Berikut tabel hasil perhitungan Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022:

Tabel 3. 12 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan

NO	ASPEK	BOBOT	NILAI BALITBANGHUB
A	Integrasi Perencanaan		
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra Badan Kebijakan Transportasi dengan sasaran Kementerian Perhubungan *)	20%	20%
2	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Badan Litbang dengan sasaran PN dalam RKP	40%	40%
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Badan Litbang dengan sasaran Renstra Badan Litbang **)	40%	40%
Total Integrasi Perencanaan			100%
<i>Keterangan:</i>			
*) diukur 1 kali dalam 5 tahun			
**) untuk mengukur Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi			

Berdasarkan tabel hasil perhitungan indeks perencanaan Badan Kebijakan Transportasi di atas, dapat disimpulkan beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian IKK4 ini adalah sebagai berikut:

- Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi telah selaras dengan Sasaran Kementerian Perhubungan, hal ini dikarenakan Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan Sasaran Program Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan juga Sasaran Prioritas Nasional dalam dokumen RKP. Kesesuaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi dengan Sasaran Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Sumber: Bagian Perencanaan dan Kerja Sama

Gambar 3. 2 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi

- b. Dokumen penganggaran Badan Kebijakan Transportasi juga telah disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan dan pemrograman Badan Kebijakan Transportasi, sehingga sasaran program Badan Kebijakan Transportasi dalam dokumen Renja Badan Kebijakan Transportasi telah sesuai dengan sasaran yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan, pemrograman, dan penganggaran Badan Kebijakan Transportasi selalu memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi serta Badan Kebijakan Transportasi selalu berkoordinasi dengan instansi-intansi terkait dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut sehingga dokumen perencanaan terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- d. Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan penyesuaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada aplikasi KRISNA RENJA sehingga indikator pada aplikasi tersebut telah sesuai dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Perencanaan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 4	Indeks Perencanaan	Nilai	82	100	100	85

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2022 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 4 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.506.389.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp4.506.373.632,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp15.368,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 14 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Perencanaan Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI	
IKK 4	Indeks Perencanaan		4.506.389.000	4.506.373.632	15.368	0,999997	
	1.	Koordinasi Perencanaan Sistem Transportasi Wilayah Ibu Kota Negara Baru	1 Laporan	145.820.000	145.818.839	1.161	0,999992
	2.	Roadmap Skema Pendanaan Alternatif Penelitian Kebijakan Transportasi	1 Laporan	517.260.000	517.260.000	-	1,000000
	3.	In House Consulting Penerapan Good Governance dan Keberlanjutan Rumusan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	567.681.000	567.681.000	-	1,000000
	4.	Manajemen Risiko Penerapan Good Governance dan Keberlanjutan Rumusan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	966.672.000	966.671.250	750	0,999999
	5.	Grand Desain Penataan Regulasi dan Kebijakan Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi	1 Laporan	764.940.000	764.939.850	150	1,000000
	6.	Pekerjaan Desain Interior Unit Kerja Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	98.208.000	98.207.250		0,999992
	7.	Harmonisasi Pelaksanaan Rencana Strategis 2020 - 2024	1 Dokumen	106.969.000	106.967.590	1.410	0,999987
	8.	Koordinasi Penyusunan Bahan dan Materi Isu Strategis Penelitian Transportasi	1 Laporan	249.552.000	249.548.147	3.853	0,999985
	9.	Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan	2 Dokumen	535.396.000	535.392.840	3.160	0,999994

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
	10. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Hasil Penelitian	1 Laporan	129.234.000	129.233.500	500	0,999996
	11. Koordinasi Penyelenggaraan SAKIP	10 Laporan	368.440.000	368.438.366	1.634	0,999996
	12. Evaluasi Kemanfaatan Sektor Transportasi	1 Laporan	56.217.000	56.215.000	2.000	0,999964

IKK 5 : Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu aspek indikator dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4 Tahun 2022 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - 1) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - 2) *E-Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - 3) *E-Purchasing*;
 - 4) *Non-E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing*;
 - 5) E-Kontrak.
- b. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDMPBJ);
- c. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setiap satu tahun sekali. Setiap indikator penilaian masing-masing memiliki bobot tersendiri di tiap tahunnya, bobot penilaian tahun 2022 dari tiap indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Tabel Penjelasan Indikator Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

NO.	INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT
A.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan:		
	1. SiRUP	a. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP \geq 50% s.d 100%, diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP; b. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $<$ 50%, diberi nilai 0 (nol).	10%
	2. <i>E-Tendering</i>	a. K/L/Pemda sudah menerapkan \geq 50% <i>E-Tendering</i> berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian; b. K/L/Pemda sudah menerapkan $<$ 50% <i>E-Tendering</i> berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).	20%
	3. <i>E-Purchasing</i>	<i>E-Purchasing</i> Katalog: a. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket \geq 50% pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian; b. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $<$ 50% pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol). <i>E-Purchasing</i> Toko Daring: a. K/L/Pemda sudah melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring, diberi nilai 100 (seratus); b. K/L/Pemda belum melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring, diberi nilai 0 (nol).	-
	4. <i>Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing</i>	a. K/L/Pemda sudah menerapkan \geq 50% <i>Non-E-Tendering</i> dan <i>Non-E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian b. K/L/Pemda sudah menerapkan $<$ 50% <i>Non-E-Tendering</i> dan <i>Non-E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).	-
	5. E-Kontrak	a. K/L/Pemda sudah menerapkan \geq 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai sesuai persentase capaian. b. K/L/Pemda sudah menerapkan $<$ 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0 (nol).	-
B.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan cara membandingkan jumlah Jabatan Fungsional (JF) PPBJ terhadap formasi JF PPBJ. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP. Jumlah JF PPBJ dihitung berdasarkan jumlah salinan SK pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP.	30%

NO.	INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT
C.	Tingkat Kematangan UKPBJ	<p>Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator.</p> <p>Perhitungan Nilai untuk masing-masing capaian kematangan UKPBJ sebagai berikut:</p> <p>a. Capaian Kematangan 9/9 Nilai 40,00 b. Capaian Kematangan 8/9 Nilai 35,56 c. Capaian Kematangan 7/9 Nilai 31,11 d. Capaian Kematangan 6/9 Nilai 26,67 e. Capaian Kematangan 5/9 Nilai 22,22 f. Capaian Kematangan 4/9 Nilai 17,78 g. Capaian Kematangan 3/9 Nilai 13,33 h. Capaian Kematangan 2/9 Nilai 8,89 i. Capaian Kematangan 1/9 Nilai 4,44 j. Capaian Kematangan 0/9 Nilai 0,00</p>	40%

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tingkat Kementerian Perhubungan oleh LKPP selaku Lembaga Pembina pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan berdasarkan surat Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 28432/SES/11/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Penayangan Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan K/L/PD Tahun 2022 pada Aplikasi SIMKU, Kementerian Perhubungan memperoleh total nilai sebesar 76,25 masuk kedalam predikat Baik, dengan rincian penilaian tiap indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	NILAI
1	SiRUP	7,20
2	E-Tendering	5,00
3	E-Purchasing	0,00
4	Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing	5,00
5	E-Kontrak	3,10
6	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	16,50
7	Tingkat Kematangan UKPBJ	40,00
TOTAL		76,80
PREDIKAT		BAIK

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

- a. Istimewa Nilai 100 (seratus).
- b. Sangat Baik Rentang nilai >90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100 (kurang dari seratus)
- c. Baik Rentang nilai >70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh)
- d. Cukup Rentang nilai >50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
- e. Kurang Nilai <50 (kurang dari lima puluh).

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa hanya dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga Badan Kebijakan Transportasi mengadopsi nilai dari Kementerian Perhubungan, sehingga realisasi IKK 5 di tahun 2022 adalah sebesar 76,80 bila dibandingkan dengan target sebesar 70 maka diperoleh capaian kinerja IKK 5 tahun 2022 adalah sebesar 109,71%.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	70	76,80	76,25	80

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan masih belum mencapai target bila dibandingkan dengan target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 5 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.296.628.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp4.296.615.920,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp12.080,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 18 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		4.296.628.000	4.296.615.920	12.080	0,999997
	1. Penyelenggaraan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN)	1 Laporan	1.144.385.000	1.144.382.642	2.358	0,999998
	2. Pengadaan Sarana Perkantoran	1 Laporan	3.152.243.000	3.152.233.278	9.722	0,999997

IKK 6 : Indeks Pengelolaan Keuangan

Indeks Pengelolaan Keuangan merupakan suatu indikator untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Badan Kebijakan Transportasi. Indikator yang diusulkan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Kinerja anggaran dengan bobot 60%;
Evaluasi kinerja anggaran merupakan suatu proses untuk melakukan, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga evaluasi kinerja anggaran dilakukan setiap tahunnya untuk memperoleh nilai kinerja anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas:

- 1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Apek Implementasi dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I /program dan tingkat satuan kerja/ kegiatan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
- 2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat eselon I/program dengan mengukur variabel-variabel capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I/ program.
- 3) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga dan tingkat eselon I / program dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

Penilaian Kinerja Anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program dihitung berdasarkan rata-rata dari:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon I /program; dan
- 2) rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan lingkup kewenangan eselon I/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon I /program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon I/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon I/program dengan bobot masing-masing aspek Evaluasi Kinerja Anggaran yaitu Aspek Implementasi dengan bobot sebesar 33,3% dan Aspek Manfaat dengan bobot sebesar 66,7%

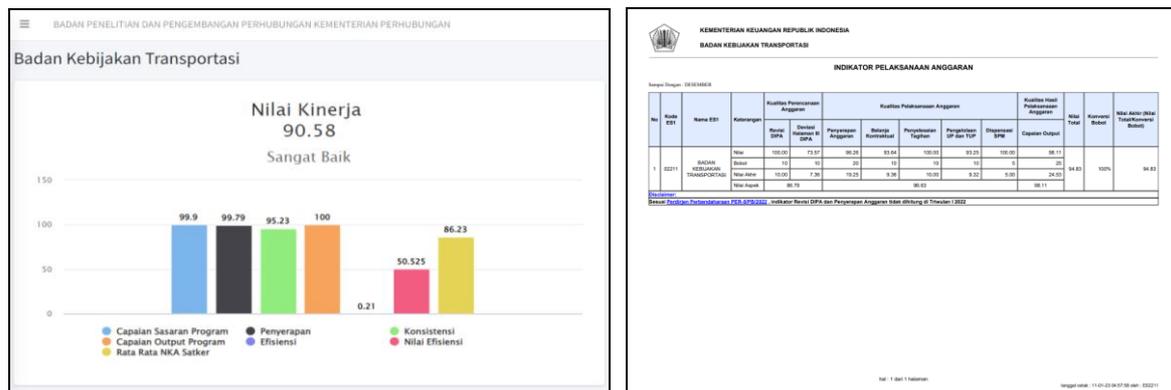
Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
 - 2) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% s.d. 90% dikategorikan dengan Baik;
 - 3) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% s.d. 80% dikategorikan dengan Cukup;
 - 4) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% s.d. 60% dikategorikan dengan Kurang;
 - 5) Nilai Kinerja Anggaran s.d. 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.
- b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%;
- IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran IKPA tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu :

- 1) Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%);
- 2) Data Kontrak (bobot nilai 10%);
- 3) Penyelesaian Tagihan (bobot nilai 10%);
- 4) Capaian Output (bobot nilai 17%);
- 5) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%);
- 6) Revisi DIPA (bobot nilai 5%);
- 7) Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%);
- 8) LPJ Bendahara (bobot nilai 5%);
- 9) Perencanaan Kas (bobot nilai 5%);
- 10) Kesalahan Surat Perintah Membayar (bobot nilai 5%);
- 11) Retur Surat Perintah Pencairan Dana (bobot nilai 5%);
- 12) Pagu Minus (bobot nilai 5%);
- 13) Dispensasi Surat Perintah Membayar (bobot nilai 5%).

Berikut hasil pengukuran nilai kinerja anggaran dan IKPA Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan:



Sumber : Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Gambar 3.3 Nilai Kinerja Anggaran dan IKPA Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022

Berdasarkan aplikasi SMART Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Transportasi adalah sebesar 90,58 jika dikalikan dengan bobot 60% maka diperoleh skor untuk nilai kinerja anggaran sebesar 54,35 dan untuk nilai IKPA Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 94,83 jika dikalikan dengan bobot 40% diperoleh hasil akhir skor untuk nilai IKPA sebesar 37,93.

Berdasarkan hasil pengukuran skor dari tiap indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi diperoleh hasil realisasi tahun 2022 adalah sebesar 92,28 telah mencapai bahkan melampaui target pada tahun 2022 yaitu sebesar 86,2 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 107,05%. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 6, antara lain:

- Pada tahun 2022 Badan Kebijakan Transportasi secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan, sehingga setiap bulan dapat diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran serta dapat segera diberikan solusi penyelesaian kendala dan permasalahan tersebut;
- Partisipasi aktif pimpinan Badan Kebijakan Transportasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan;
- Pada masa pandemi di tahun 2022 Badan Kebijakan Transportasi mampu secara cepat beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat pada masa pandemi, sehingga kendala yang terjadi pada saat masa pandemi dapat segera teratasi;
- Pelaksanaan kegiatan daring atau online pada masa pandemi seperti *meeting online*, webinar, dan pengumpulan data penelitian menggunakan aplikasi *e-survey*. Hal tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 pada masa pandemi.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan	Nilai	86,20	92,28	88,46	90,20

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2022 mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang disebabkan oleh nilai capaian output program terhadap indikator Layanan Penunjang Teknis Riset pada aplikasi SMART tidak dapat dilakukan pengisian sehingga capaian menjadi 0 (nol) dan hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan Trilateral Meeting antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada aplikasi KRISNA RENJA yang merupakan sumber data dalam aplikasi SMART namun sampai dengan batas akhir pengisian aplikasi SMART penyesuaian indikator tersebut belum dilakukan approval oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga capaian realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 6 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp37.646.227.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp37.643.810.591,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.416.409,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 20 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
	Indeks Pengelolaan Keuangan		37.646.227.000	37.643.810.591	2.416.409	0,999936
IKK 6	1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Laporan	30.945.758.000	30.943.391.058	2.366.942	0,999924
	2. Honorarium Sopir / Satpam / Pramubakti / Tenaga Keamanan Lainnya / Dokter Dan Perawat	12 Laporan	5.416.050.000	5.416.048.850	1.150	1,000000
	3. Honor Pengelola Anggaran	12 Laporan	256.880.000	256.880.000	-	1,000000

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
	4. Penyelenggaraan Sistem Akuntansi, Audit, Pelaporan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	3 Laporan	584.062.000	584.016.301	45.699	0,999922
	5. Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan	1 Laporan	443.477.000	443.474.382	2.618	0,999994

IKK 7 : Indeks Penyelenggaraan Perkantoran

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Badan Kebijakan Transportasi. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada *stakeholders* (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi, lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelayanan pengguna sarana dan prasarana perkantoran di gedung Kantor Badan Kebijakan Transportasi yang meliputi aspek sarana, prasarana, SDM, keselamatan dan keamanan gedung serta fasilitas lainnya yang tersedia di lingkungan kantor Badan Kebijakan Transportasi. Kualitas pelayanan tersebut dinilai dari tingkat kenyamanan, keamanan, kemudahan dan keterjangkauan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Pengukuran indeks penyelenggaraan perkantoran dihitung dengan melalui survey yang dilakukan dengan pengisian kuesioner yang nantinya nilai kuesioner akan dikonversi ke dalam bentuk persentase (%).

Kuesioner yang digunakan untuk penilaian IKK 7 terdiri dari 3 aspek yaitu Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sumber Daya Manusia, dan Aspek Keselamatan dan Keamanan Gedung dengan jumlah total pertanyaan sebanyak 88 pertanyaan. Teknik pengambilan sampel responden menggunakan Rumus Slovin dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

n = Sampel, N = Populasi, d = nilai presisi 90% atau sig.0,10

Responden dalam pengisian kuesioner ini terdiri dari dua kategori yaitu kategori internal yang merupakan pegawai Kementerian Perhubungan (termasuk pegawai Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan pengunjung lainnya) dan kategori eksternal yang pengunjung lainnya yang berkunjung ke kantor Badan Kebijakan Transportasi. Berikut tabel perhitungan pengambilan sampel responden:

Tabel 3. 21 Perhitungan Pengambilan Sampel Responden menggunakan Rumus Slovin dan Realisasi Responden

NO.	RESPONDEN	POPULASI	NILAI PRESISI	TOTAL SAMPEL	REALISASI SAMPEL
1.	Internal	231	10%	208	219
2.	Eksternal	6011	10%	5410	5501
TOTAL				5618	5720

Analisis hasil survey dilakukan dengan menggunakan analisis Skala Likert yang merupakan salah satu bentuk skala yang digunakan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif. Data tersebut diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi, ataupun sikap seseorang terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Skor Skala Likert dalam pengukuran IKK 7 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Skor Skala Likert

SKOR	JAWABAN
1	Tidak Baik
2	Kurang Baik
3	Cukup Baik
4	Baik
5	Sangat Baik

Dari seluruh data yang terkumpul, maka dilakukan pengklasifikasian berdasarkan jenis jawaban yang diperoleh setelah itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rumus = T \times Pn$$

T = Total jumlah responden yang memilih, Pn = Pilihan angka skor Likert

Setelah itu dilakukan pengukuran Skor Interpretasi yang harus terlebih dahulu diketahui skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = Skor Tertinggi Likert \times Jumlah Responden \quad X = Skor Terendah \times Jumlah Responden$$

Langkah terakhir, untuk mengetahui kesimpulan dari hasil survey adalah dengan menghitung Skor Interpretasi responden yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100\%$$

Tabel 3. 23 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran dengan Analisis Skala *Likert*

SKOR	JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	JUMLAH SKOR LIKERT	SKOR TERTINGGI (Y)	SKOR TERENDAH (X)
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) x (3)	(5)	(6)
1	Tidak Baik	18609	18609	Y = 5 x 370240	X = 1 x 370240
2	Kurang Baik	21249	42498		
3	Cukup Baik	79855	239565		
4	Baik	138211	552844		
5	Sangat Baik	112316	561580		
TOTAL SKOR			1415096	1851200	1415096
Indeks (%) = $\frac{1415096}{1851200} \times 100\%$					76,44%

Setelah dilakukan perhitungan indeks, perlu dilakukan pengukuran interval (rentang jarak) dan interpretasi persentase dengan metode mencari Interval Skor Persen (I) dengan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (Likert)}}$$

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh hasil Interval Skor Persen yaitu sebesar 20 yang interval jaraknya dari terendah sebesar 0% hingga tertinggi sebesar 100%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$I = \frac{100}{5} = 20$$

Dari pengukuran interpretasi skor di atas, diperoleh hasil berdasarkan interval adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Interval Interpretasi Skor

SKOR	JAWABAN
0% - 19,99%	Tidak Baik
20% - 39,99%	Kurang Baik
40% - 59,99%	Cukup Baik
60% - 79,99%	Baik
80% - 100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel perhitungan di atas diperoleh realisasi untuk IKK 7 pada tahun 2022 adalah sebesar 76,44 dengan interpretasi skor “**Baik**”, telah melampaui target ditahun 2022 sebesar 72 sehingga diperoleh capaian kinerja untuk indikator indeks penyelenggaraan perkantoran sebesar 106,17%. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Komitmen tinggi Badan Kebijakan Transportasi dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perkantoran dengan tersedianya sarana dan prasarana di kantor Badan Kebijakan Transportasi yang memadai dan secara berkala rutin dilakukan pemeliharaan setiap tahunnya, sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan dengan semestinya. Selain itu Badan Kebijakan Transportasi selalu melakukan *update* sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna dan perubahan teknologi;
- b. Badan Kebijakan Transportasi secara rutin setiap harinya melakukan pengarahan dan evaluasi kinerja kepada SDM pelaksana penyelenggaraan perkantoran, sehingga SDM tersebut dapat memberikan pelayanan yang prima;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana Badan Kebijakan Transportasi yang mendukung keselamatan dan keamanan para pengguna.

Badan Kebijakan Transportasi akan melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penyelenggaraan perkantoran sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan oleh para responden dalam pengisian kuesioner survey indeks penyelenggaraan perkantoran. Secara rinci penilaian indkes penyelenggaraan perkantoran dari tiap aspek penilaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 25 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Masing-masing Aspek Penilaian

NO.	ASPEK	JUMLAH SKOR LIKERT	SKOR TERTINGGI (Y)	INDEKS (%)	INTERPRETASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)
1	Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran	846965	1107990	0,764415744	Baik
2	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	217325	285530	0,761128428	Baik
3	Aspek Keselamatan dan Keamanan Gedung	350806	457680	0,766487502	Baik
TOTAL SKOR		1415096	1851200	76,44%	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai indeks terendah yaitu pada Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan nilai indeks tertinggi yaitu pada Keselamatan dan Keamanan Gedung dengan predikat “Baik”.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	72	76,44	78,92	74

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2022 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 7 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp11.094.458.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp11.092.828.196,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp1.629.804,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 27 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI	
IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran		11.094.458.000	11.092.828.196	1.629.804	0,999853	
	1.	Poliklinik / Obat-Obatan	1 Laporan	29.669.000	29.668.080	920	0,999969
	2.	Pengadaan Pakaian Dinas	1 Laporan	196.031.000	196.031.000	-	1,000000
	3.	Perawatan Peralatan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	272.614.000	272.613.500	500	0,999998
	4.	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10	1 Laporan	392.917.000	391.342.136	1.574.864	0,995992
	5.	Perawatan Kendaraan Roda 2 (Dua) Dan Sepeda	1 Laporan	14.107.000	14.106.800	200	0,999986
	6.	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	1 Laporan	981.594.000	981.592.596	1.404	0,999999
	7.	Langganan Daya Dan Jasa	1 Laporan	3.620.848.000	3.620.845.443	2.557	0,999999
	8.	Pencegahan Penyebaran COVID-19	1 Laporan	1.100.205.000	1.100.204.000	1.000	0,999999
	9.	Penambahan Daya Tahan	1 Laporan	811.623.000	811.622.933	67	1,000000

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
	Tubuh					
10.	Perawatan Gedung Kantor	1 Laporan	2.582.995.000	2.582.954.575	40.425	0,999984
11.	Pelaksanaan Satuan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban Gedung (PKG)	1 Laporan	665.377.000	665.371.951	5.049	0,999992
12.	Penyelenggaraan Fungsi Ketatausahaan, Kearsipan dan Keprotokolan	1 Laporan	426.478.000	426.475.182	2.818	0,999993

IKK 8 : Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Kementerian. Pedoman tingkat maturitas SPIP ditetapkan melalui peraturan kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Tingkatan level maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Tingkatan Level Maturitas SPIP

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN
0	Belum ada (dalam penataan)	0 < skor < 1.0	Belum memiliki kebijakan dan prosedur.
1	Rintisan	1.0 < Skor < 2.0	Ada praktik pengendalian intern - ada kebijakan dan prosedur tertulis. Namun masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik tanpa komunikasi dan Pemantauan.
2	Berkembang	2.0 < Skor < 3.0	Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
3	Terdefinisi	3.0 < Skor < 4.0	Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	Terkelola dan Terukur	4.0 < Skor < 4.5	Ada Praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN
5	Optimum	4.5 < Skor < 5	Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan. Terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Pada tahun 2022 terdapat perubahan pedoman penilaian tingkat maturitas SPIP yang telah disahkan dalam Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2022 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemenrintah Daerah. Berdasarkan pedoman ini penilaian maturitas SPIP dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I maupun Eselon II yang nantinya hasil Penilaian Mandiri (PM) tersebut akan direkapitulasi menjadi nilai akhir maturitas SPIP tingkat Kementerian Perhubungan yang kemudian nilai tersebut akan dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Perubahan penilaian juga terdapat pada objek penilaian, dimana pada penilaian maturitas SPIP sebelumnya hanya penilaian struktur dan proses, sedangkan pada penilaian maturitas SPIP yang baru meliputi aspek perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil. Selain itu, juga terdapat perubahan pada hasil penilaian SPIP terintegrasi yang terdiri dari Nilai Maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan Penjaminan Kualitas maturitas SPIP Tahun 2022 terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor	
			Hasil PK	Hasil Evaluasi BPKP
1.	Penetapan Tujuan	5	2,000	2,000
2.	Struktur dan Proses	2	0,753	0,649
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,825	0,825
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,578	3,474
	-MRI	3	3,19	3,00
	-IEPK	2	2,07	2,07

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Perhubungan telah memenuhi target tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Kebijakan Transportasi yaitu pada level 3 (terdefinisi). Selain itu, berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan oleh BPKP sesuai surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan Nomor PE.09.03/LHP-206/D103/2/2022 tanggal 30 Desember 2022 bahwa hasil evaluasi menunjukkan secara umum penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP

telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP dan hasil evaluasi menunjukkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,474 dan berada pada level 3. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh capaian kinerja untuk IKK 8 adalah sebesar 100%.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2022 telah mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 8, antara lain:

- Badan Kebijakan Transportasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
- Dari sisi manajemen risiko, menunjukkan Badan Kebijakan Transportasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
- Selanjutnya dilihat dari efektifitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa Badan Kebijakan Transportasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum adalah perlu melakukan finalisasi penyusunan dan diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya. Evaluasi dan monitoring secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian yang terintegrasi dalam kegiatan. Selain itu, perlu melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 8 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp280.431.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp280.429.190,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp1.810,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 31 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
	Tingkat Maturitas SPIP		280.431.000	280.429.190	1.810	0,999994
IKK 8	Koordinasi Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)	2 Laporan	280.431.000	280.429.190	1.810	0,999994

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan

Pencapaian sasaran strategis ketiga diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 32 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2022	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan	%	85	100	117,65

IKK 9 : Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan

Perkembangan tantangan dan kendala yang dihadapi sektor transportasi akhir-akhir ini semakin besar ditambah dengan adanya tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, Badan Kebijakan Transportasi sebagai penyelenggara analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi dituntut mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan mudah diaplikasikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerja sama dengan pihak lain ditunjang dengan sumber daya yang ada, serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam hal ini selaku koordinator kegiatan kerjasama bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan administrasi kerjasama dan memantau pelaksanaan kerjasama di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Pada tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi telah melaksanakan penandatanganan MoU dengan dua instansi antara lain:

1. Kerja Sama dengan Perum LPPNPI tentang Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan yang telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan nomor HK.201/1/21/BLT/2022 yang berlaku tahun 2022 s.d. 2027.

Tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman ini antara lain:

- a. Telah dilaksanakan rapat tindak lanjut penandatanganan MoU dan pembahasan isu strategis bidang navigasi penerbangan pada tanggal 25 s.d. 26 Agustus dan 1 s.d. 2 September 2022.
- b. Telah dirancang Perjanjian Kerja Sama antara divisi internal di Perum LPPNPI dengan Puslitbang Transportasi Udara, sebelum Badan Litbang Perhubungan bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi.

2. Kerja Sama dengan PT PAL Indonesia tentang Analisis Teknis Bidang Pelayaran yang telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan nomor KL.002/01/01/BKT/2022 yang berlaku tahun 2022 s.d. 2024.

Tindak lanjut dari pendatanganan nota kesepahaman ini telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait substansi teknis penerapan kewajiban *lashing* pada kendaraan diatas kapal penyeberangan dan survey pengumpulan data oleh Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada tanggal 27 Oktober 2022 di BPTD Wilayah VIII Prov. Banten.

Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama}}{\text{Jumlah Total Kerja Sama}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan perubahan susunan organisasi Kementerian Perhubungan yang awalnya terdapat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan saat ini menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Dengan adanya transformasi unit kerja ini, Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi belum dapat dilakukan secara maksimal.

Sampai akhir tahun 2022, hanya terdapat dua kerja sama hanya terdapat 2 (dua) kerja sama yang dihasilkan dan telah ditindaklanjuti. Sehingga realisasi IKK 9 untuk tahun 2022 sebesar 100%.

Perbandingan realisasi indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan	%	85	100	100	87

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2022 telah melampaui di tahun 2022 maupun target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Dalam pencapaian target indikator ini kedepannya perlu komitmen dan konsistensi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antara masing-masing pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan ini serta dukungan dan partisipasi aktif dari para pimpinan Badan Kebijakan Transportasi.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 9 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp796.886.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp796.883.330,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.670,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 34 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan		796.886.000	796.883.330	2.670	0,999997
	Penyelenggaraan Koordinasi Kerjasama Penelitian	1 Laporan	796.886.000	796.883.330	2.670	0,999997

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik

Pencapaian sasaran strategis keempat diwujudkan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 35 Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2022	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	92	100	108,70
IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi	%	70	70,73	101,04

IKK 10 : Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi untuk melakukan pengelolaan aplikasi dan data sebagai pendukung dalam pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.

Pada tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan pengembangan dan pembangunan aplikasi yang telah dimanfaatkan baik oleh internal maupun eksternal. Selain

aplikasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi juga telah menyusun data-data yang juga dapat dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal.

Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data (IKK 10) ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan pengelolaan aplikasi dan data Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2022. Metode perhitungan IKK 10 ini yaitu Jumlah aplikasi yang digunakan dibagi dengan jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dengan bobot 50% dan Jumlah data yang dimanfaatkan dengan bobot 50%. Berikut daftar aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan pada tahun 2022 serta daftar data yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Transportasi:

Tabel 3. 36 Daftar Aplikasi dan Data Tahun 2022

APLIKASI/DATA	PEMANFAATAN
APLIKASI	
1. e-Penelitian	<i>database</i> hasil penelitian Badan Kebijakan Transportasi
2. Sigap Sihati	Sarana pengaduan dan permintaan informasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi
3. <i>e-Survey</i>	Sarana pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi
4. OJS (<i>Open Journal System</i>)	Aplikasi pengelolaan jurnal di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi
5. <i>e-Library</i>	Aplikasi pengelolaan perpustakaan Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi
6. <i>Cloud</i> Balitbanghub	Aplikasi penyimpanan data Badan Kebijakan Transportasi
7. Aplikasi Lomba Logo BKT dan penjurian	Aplikasi yang digunakan untuk dalam pelaksanaan Lomba Logo dan sistem penjurian lomba
8. Pengembangan Aplikasi E-Survey Fitur WA Blasting dan Profiling data	Aplikasi untuk blastik Informasi Link Survey menggunakan WhatsApp
9. Pengembangan Official <i>Website</i> tranformasi Litbang ke BKT	Sarana informasi profil Badan Kebijakan Transportasi dan juga sarana informasi berita terkini tentang Badan Kebijakan Transportasi
DATA	
1. Data Statistik	Data Statistik Badan Kebijakan Transportasi akan dijadikan Buku Statistik oleh Kementerian Perhubungan
2. Data Riset dan Teknologi	Data Riset dan Teknologi Badan Kebijakan Transportasi akan dijadikan buku oleh Kementerian Riset dan Teknologi
3. Data Gender	Data gender yang terdiri dari komposisi jumlah, pendidikan, jabatan pegawai Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan Gender telah digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Data e-Survey	Data hasil survey yang dijadikan <i>database</i> untuk pelaksanaan survey selanjutnya yang akan dilaksanakan
5. Data SPBE	Data Badan Kebijakan Transportasi yang dimanfaatkan untuk keperluan audit internal

Berdasarkan tabel daftar aplikasi dan data Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 di atas terdapat 9 aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan, dari sembilan aplikasi tersebut pada tahun 2022 seluruh aplikasi tersebut telah dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal. Begitu juga dengan lima data yang dimiliki telah dimanfaatkan oleh pihak eksternal Badan Kebijakan Transportasi. Target tahun 2022 untuk indikator ini adalah 92% dan telah terealisasi pada tahun 2022 sebesar 100% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini diperoleh sebesar 108,70%. Faktor keberhasilan dari indikator ini adalah ketersediaan anggaran dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dari para penanggung jawabnya serta adanya koordinasi pembagian tugas serta manajemen yang baik sehingga dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	92	100	100	93

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2020 dan sudah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 10 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp346.211.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp346.207.933,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp3.067,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 38 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data		346.211.000	346.207.933	3.067	0,999991
	1. Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi	1 Laporan	213.734.000	213.732.537	1.463	0,999993
	2. Penyelenggaraan Pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	1 Laporan	132.477.000	132.475.396	1.604	0,999988

IKK 11 : Tingkat Pengelolaan Publikasi

Merupakan perhitungan kinerja berdasarkan hasil publikasi baik berupa publikasi dengan media, jurnal maupun kanal publikasi lainnya. Perhitungan realisasi untuk indikator ini menggunakan bobot dari setiap jenis publikasi yang telah dilakukan. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan penanggung jawab jurnal publikasi Warta Penelitian dan juga sebagai koordinator pengelolaan jurnal di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Badan Kebijakan Transportasi saat ini memiliki 5 (lima) jurnal transportasi yaitu Warta Penelitian, Jurnal Transportasi Multimoda, Jurnal Transportasi Darat, Jurnal Transportasi Laut, dan Warta Ardhia yang dikelola oleh masing-masing Unit Eselon II di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Suatu jurnal dikatakan berkualitas apabila memperoleh akreditasi dari LIPI selaku pembina lembaga penelitian di Indonesia, karenanya publikasi penelitian melalui jurnal terakreditasi menjadi salah satu target capaian. Jurnal Badan Kebijakan Transportasi telah terakreditasi SINTA dari Kemenristek dengan peringkat akreditasi SINTA 2 untuk Warta Penelitian, Jurnal Transportasi Multimoda, Jurnal Transportasi Darat, dan Warta Ardhia sedangkan Jurnal Transportasi Laut telah terakreditasi SINTA 4.

Selain melalui jurnal terakreditasi hasil penelitian juga dapat dipublikasikan melalui media sosial, media cetak maupun *online*, *website*, dan penerbitan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi selain sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan jurnal juga berperan sebagai koordinator yang bertugas menghimpun, mengevaluasi kelayakan naskah dan memroses pengajuan HKI kepada Kemenkum HAM dan juga penanggung jawab dalam publikasi melalui media sosial, media cetak maupun *online*, dan melalui *website* Badan Kebijakan Transportasi.

Perhitungan untuk indikator ini menggunakan sistem bobot yang diberikan pada masing-masing jenis publikasi penelitian, yaitu :

- Jurnal terakreditasi dengan bobot 25%;
- Media Cetak dan *Online* dengan bobot 20%;
- Sertifikat HKI dengan bobot 17,5%;
- Webinar dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan bobot 17,5%;
- Website* Balitbanghub dengan bobot 10%; dan
- Media Sosial dengan bobot 50%.

Berdasarkan skor pembobotan tersebut telah dilakukan perhitungan untuk realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi, yaitu:

Tabel 3. 39 Skor Pembobotan Tingkat Publikasi

NO	PUBLIKASI/DISEMINASI	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SKOR AKHIR
1	Jurnal terakreditasi	25%	12	13	108,33%	27,08%
2	Media cetak dan online (artikel)	20%	8	4	50,00%	10,00%
3	HKI	18%	50	0	0,00%	0,00%
4	Webinar/FGD	18%	18	6	33,33%	5,83%
5	Website	10%	35	39	111,43%	11,14%
6	Medsos	10%	30	50	166,67%	16,67%
		100%		TOTAL SKOR		70,73%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka realisasi masih belum diperoleh untuk media publikasi melalui sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Publikasi melalui sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dilaksanakan karena output HKI berasal dari hasil penelitian, sedangkan saat ini ada perubahan organisasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi yang memiliki output rekomendasi kebijakan yang artinya tidak dapat diajukan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Akan tetapi pada tahun 2022 terdapat pengajuan Hak Paten yang sedang dalam tahap proses pengajuan kepada instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sampai akhir tahun 2022 sampai pada proses rekomendasi awal.

Hak paten yang masih dalam tahap pengajuan antara lain:

1. Sistem Deteksi Genangan Air Pada Landasan Pacu Bandar Udara.
2. Metode Untuk Mendeteksi Genangan Air Pada Landasan Pacu Bandar Udara.
3. Kover Pelindung Detektor Genangan Air Pada Landasan Pacu Dengan Menggunakan Material Baja.
4. Kover Pelindung Detektor Genangan Air Pada Landasan Pacu Dengan Menggunakan Material Komposit.

Meskipun terdapat beberapa media publikasi/diseminasi yang belum mencapai target di tahun 2022, angka realisasi untuk IKK 11 yaitu sebesar 70,73% telah melampaui target pada tahun 2022 yaitu sebesar 70%. Capaian kinerja untuk indikator ini diperoleh sebesar 101,04%.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi Tahun 2022 dengan target 2022, realisasi tahun 2021, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024
IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi	%	70	70,73	97,53	75

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan belum mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pada indikator ini disebabkan oleh komitmen dan konsistensi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

Tindaklanjut untuk peningkatan realisasi di tahun yang akan datang yaitu perlu disepakati kembali terkait indikator penilaian yang digunakan karena Indikator Sertifikasi HKI sudah tidak berlaku seiring dengan transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi dan perlu dipertimbangkan untuk tata cara penghitungan Hak Paten. Proses pengajuan hak paten membutuhkan waktu lama, ditahun 2022 Badan Kebijakan Transportasi

sudah mengajukan sertifikasi sesuai jadwal dan SOP internal yang berlaku akan tetapi masih dalam tahap rekomendasi awal dan perlu penentuan perhitungan apakah dihitung sertifikat patennya atau perlu dibatasi sampai proses pengajuan saja.

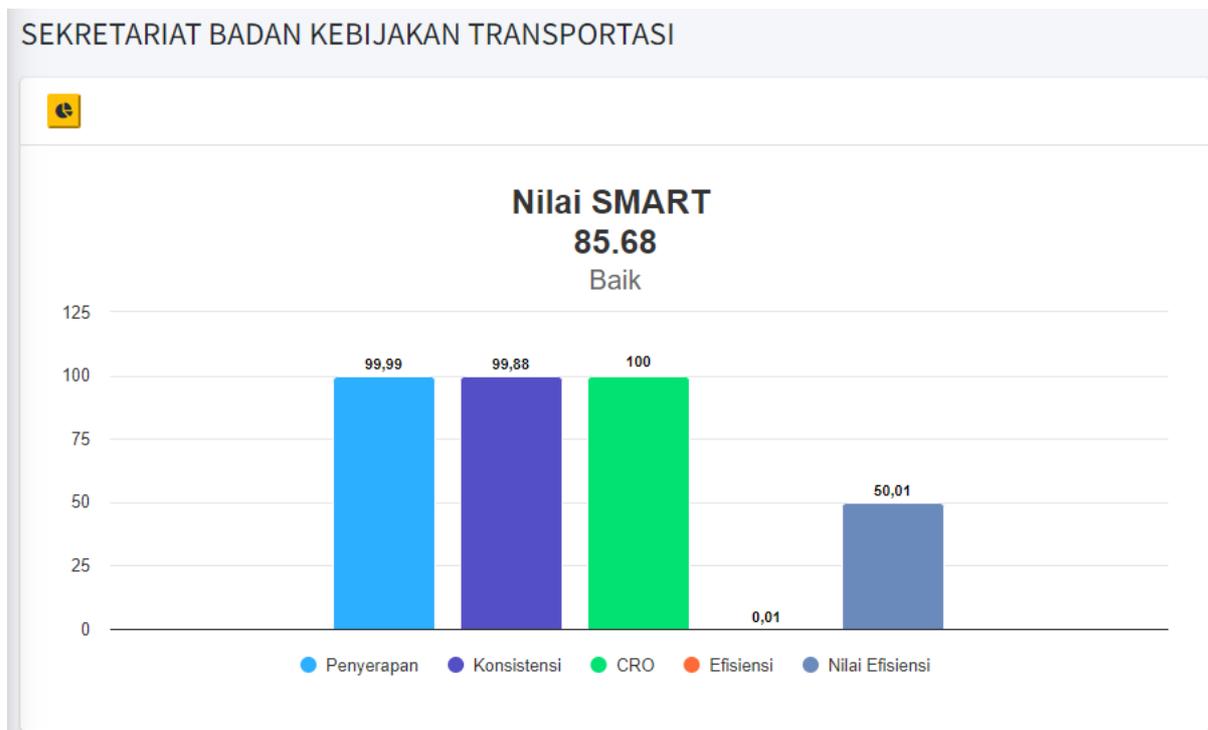
Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 11 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.191.165.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp2.191.147.431,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp17.569,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 41 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Publikasi Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)	REALISASI 2022	SISA	CAPAIAN REALISASI	
IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi		2.191.165.000	2.191.147.431	17.569	0,999992	
	1.	Penyelenggaraan Pengelolaan Publikasi Ilmiah	1 Laporan	404.645.000	404.642.243	2.757	0,999993
	2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Publik dan Koordinasi Kehumasan	1 Laporan	628.626.000	628.622.109	3.891	0,999994
	3.	Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Hukum dan HAKI	1 Laporan	140.093.000	140.091.889	1.111	0,999992
	4.	Penyelenggaraan Jumpa Pers / Media Release / Pers Background / Publikasi Media dan Pameran / Visualisasi	1 Laporan	593.262.000	593.258.855	3.145	0,999995
	5.	Survei Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	122.281.000	122.278.270	2.730	0,999978
	6.	Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan	1 Laporan	302.258.000	302.254.065	3.935	0,999987

III.2.2. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dari segi anggaran, berdasarkan penilaian kinerja dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) milik Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan efisiensi anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi untuk tahun 2022 adalah sebesar 0,03% dengan nilai kinerja 84,86%. Secara rinci penilaian kinerja pada aplikasi SMART dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Gambar 3. 4 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Pada Tahun 2022 telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/ PMK.02/2022 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK 02/ 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada peraturan terbaru mengatur tata cara pengukuran pada proses evaluasi kinerja, yang terdiri 5 (lima) indikator, dengan pengelompokan kategori Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% termasuk dalam kategori Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% sampai dengan 90% termasuk dalam kategori Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% sampai dengan 80% termasuk dalam kategori Cukup;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% sampai dengan 60% termasuk dalam kategori Kurang; dan
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% termasuk dalam kategori Sangat Kurang.

Rincian perhitungan nilai kinerja anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, adalah sebagai berikut:

1. Capaian Rincian Output (RO) Tingkat Satuan Kerja

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:
 CRO : capaian RO tingkat satuan kerja
 RVRO_i : realisasi volume RO i
 TVRO_i : target volume RO i
 m : jumlah RO

Tabel 3. 42 Target dan Realisasi Capaian Rincian *Output* Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022

NO.	RINCIAN OUTPUT	VOLUME		(RVRO / TVRO) x 100%	CAPAIAN RO PER SATKER
		Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
1.	Kajian Sistem Transportasi Ibukota Negara	1	1	100%	100%
2.	Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan	1	1	100%	
3.	Layanan administrasi dan pengembangan SDM	1	1	100%	
4.	Kebijakan Tata Kelola Internal	1	1	100%	
5.	Layanan Administrasi Rencana, Program dan Evaluasi Riset Kebijakan	1	1	100%	
6.	Layanan Administrasi, Keuangan, Barang Milik Negara, Perlengkapan dan Kerumahtanggan Riset Kebijakan	1	1	100%	
7.	Administrasi Perkantoran Kesekretariatan	1	1	100%	
8.	Administrasi Sarana Internal	1	1	100%	
9.	Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu-Isu Strategis	1	1	100%	
10.	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	1	1	100%	
11.	Layanan Publikasi, Kepustakaan dan Kehumasan	1	1	100%	

$$CRO = \left(\left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \right)^{\frac{1}{11}} \times 100\%$$

$$CRO = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas capaian RO Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2022 adalah sebesar 100%.

2. Penyerapan Anggaran

Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2022 didapatkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:
P : penyerapan anggaran
RA : realisasi anggaran
AA : alokasi anggaran

Tabel 3. 43 Tingkat Penyerapan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 per Bulan

NO	BULAN	RPD (Rp,-)	REALISASI ANGGARAN (Rp,-)	TINGKAT PENYERAPAN
1	Januari	3.318.525.252	5.963.211.666	9,12%
2	Februari	3.394.584.343	4.853.663.435	16,53%
3	Maret	6.182.093.142	4.892.777.844	24,01%
4	April	6.145.529.778	6.963.364.029	34,66%
5	Mei	5.914.575.885	5.001.429.803	42,30%
6	Juni	5.654.622.190	7.082.327.307	53,13%
7	Juli	6.022.119.005	8.142.734.105	65,57%
8	Agustus	6.138.734.796	5.795.988.643	74,43%
9	September	5.298.777.242	4.358.866.134	81,10%
10	Oktober	6.419.587.453	5.444.993.714	89,42%
11	November	4.930.352.067	3.149.271.911	94,23%
12	Desember	5.998.620.026	3.768.748.833	99,99%
TOTAL		65.418.121.179	65.417.377.424	99,99%

*Sumber: Aplikasi SMART (<http://smart.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 99,99%.

3. Analisis Efisiensi Tingkat Satuan Kinerja

Formula penghitungan efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:
 E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
 $AARO_i$: alokasi anggaran RO i
 $RARO_i$: realisasi anggaran RO i
 CRO_i : capaian RO i

Tabel 3. 44 Perhitungan Skalia Efisiensi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022

NO.	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	CRO PER KRO (%)	ALOKASI ANGGARAN (AAKRO)	REALISASI ANGGARAN (RAKRO)	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) X (3)	(7) = (6) - (5)
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100	2.813.934.000	2.813.915.611	2.813.934.000	18.389
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100	48.431.053.000	48.427.055.564	48.431.053.000	3.997.436
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100	3.152.243.000	3.152.233.278	3.152.243.000	9.722
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	100	8.486.891.000	8.486.817.607	8.486.891.000	73.393
5	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100	2.537.376.000	2.537.355.364	2.537.376.000	20.636
JUMLAH			45.843.217.000	45.831.591.266	65.421.497.000	4.119.576
<i>Efisiensi RO Satker</i> = $\frac{\sum(7)}{\sum(4)} \times 100\%$					0,01%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Persentase Efisiensi Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 0,01%. Untuk mendapatkan Nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian *output*, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu 0% s.d. 100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0% s.d. 100%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% s.d. 100%, dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:
 NE : Nilai efisiensi
 E : Efisiensi

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,01}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50,03\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Nilai Efisiensi Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 50,03%.

4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:
 K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 RAK_n : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n
 RPDK_n : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n
 n : jumlah bulan

Tabel 3. 45 Rencana Penarikan Dana Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 per Bulan

NO	BULAN	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KUMULATIF
1	Januari	3.318.525.252	3.318.525.252	5.963.211.666	5.963.211.666
2	Februari	3.394.584.343	6.713.109.595	4.853.663.435	10.816.875.101
3	Maret	6.182.093.142	12.895.202.737	4.892.777.844	15.709.652.945
4	April	6.145.529.778	19.040.732.515	6.963.364.029	22.673.016.974
5	Mei	5.914.575.885	24.955.308.400	5.001.429.803	27.674.446.777
6	Juni	5.654.622.190	30.609.930.590	7.082.327.307	34.756.774.084
7	Juli	6.022.119.005	36.632.049.595	8.142.734.105	42.899.508.189
8	Agustus	6.138.734.796	42.770.784.391	5.795.988.643	48.695.496.832
9	September	5.298.777.242	48.069.561.633	4.358.866.134	53.054.362.966
10	Oktober	6.419.587.453	54.489.149.086	5.444.993.714	58.499.356.680
11	November	4.930.352.067	59.419.501.153	3.149.271.911	61.648.628.591
12	Desember	5.998.620.026	65.418.121.179	3.768.748.833	65.417.377.424

*Sumber: Aplikasi SMART (<http://smart.kemenkeu.go.id>)

Dari tabel di atas sebagai contoh pada Bulan Januari diperoleh nilai konsistensi adalah sebagai berikut:

$$K (\text{Januari}) = \left(\frac{3.318.525.252 - [3.318.525.252 - 5.963.211.666]}{3.318.525.252} \right) \times 100\%$$

$$K (\text{Januari}) = 20,305\%$$

Dengan cara yang sama, diperoleh nilai konsistensi untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 46 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran per Bulan Tahun 2022

NO	BULAN	TINGKAT KONSISTENSI PER BULAN
(1)	(2)	(3)
1	Januari	99,84%
2	Februari	99,85%
3	Maret	99,87%
4	April	99,83%
5	Mei	99,88%
6	Juni	99,84%
7	Juli	99,96%
8	Agustus	99,95%
9	September	99,85%
10	Oktober	99,77%
11	November	99,87%
12	Desember	99,88%
$\text{Konsistensi Penyerapan} = \frac{\sum(3)}{12}$		99,88%

Sumber: Hasil Analisis 2022

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 99,88%.

5. Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satuan Kerja

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satuan Kerja sama dengan cara perhitungan Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NKI} = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (\text{COP} \times W_{\text{COP}} \text{ atau } \text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{NE} \times W_E)$$

Keterangan:

NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP: capaian *Output* Program

CRO: capaian RO

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_K : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian *Output* Program

W_{CRO} : bobot capaian RO

W_E : bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

$$W_P = 9,7\%$$

$$W_K = 18,2\%$$

$$W_{COP} = W_{CRO} = 43,5\%$$

$$W_E = 28,6\%$$

Tabel 3. 47 Nilai Variabel Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022

PENYERAPAN ANGGARAN (P)	KONSITENSI PENYERAPAN (K)	CAPAIAN RO (CRO)	NILAI EFISIENSI (NE)
99,99 %	99,88%	100%	52,50%

$$NKA = (99,99 \times 9,7\%) + (99,88 \times 18,2\%) + (100 \times 43,5\%) + (50,03 \times 28,6\%)$$

$$NKA = 85,68$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 85,68%.

III.2.3. CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA

Sebagai unit kerja pendukung kegiatan utama Badan Kebijakan Transportasi, sepanjang tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi senantiasa berusaha memberikan dukungan layanan manajemen dan manajemen teknis lainnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Beberapa capaian keberhasilan lainnya serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi di Tahun 2022 antara lain:

1. Juara II Lomba Konten UPT Kemenhub dengan tema “ASN Kemenhub Bangga Menggunakan Buatan Indonesia”

Dalam rangka mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Jambi Tahun 2022, membangun rasa cinta ASN Kementerian Perhubungan terhadap buatan Indonesia, mendorong aktivitas dan minat membaca juga partisipasi pada intraweb mitra, serta selaras dengan arahan Menko Marvest untuk melakukan aksi afirmatif penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Lomba Konten UPT Kemenhub melalui Intra web mitra.dephub.go.id.

Sekretariat Badan Litbang Perhubungan ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba tersebut dan berhasil menjadi juara ke-2 dengan mengirimkan konten UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengangkat tema “Selasa di Kementerian Perhubungan”. Lomba tersebut diikuti oleh Humas Bagian Data Humas Publikasi dengan Penulis Artikel Prilla Kinantya, Pranata Humas Pertama Badan Litbang Perhubungan.



Gambar 3. 6 Pemberian apresiasi pemenang Lomba oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenkomarvest



Gambar 3. 5 Piagam Penghargaan Juara ke-2 Lomba Konten UPT

III.3. REALISASI ANGGARAN

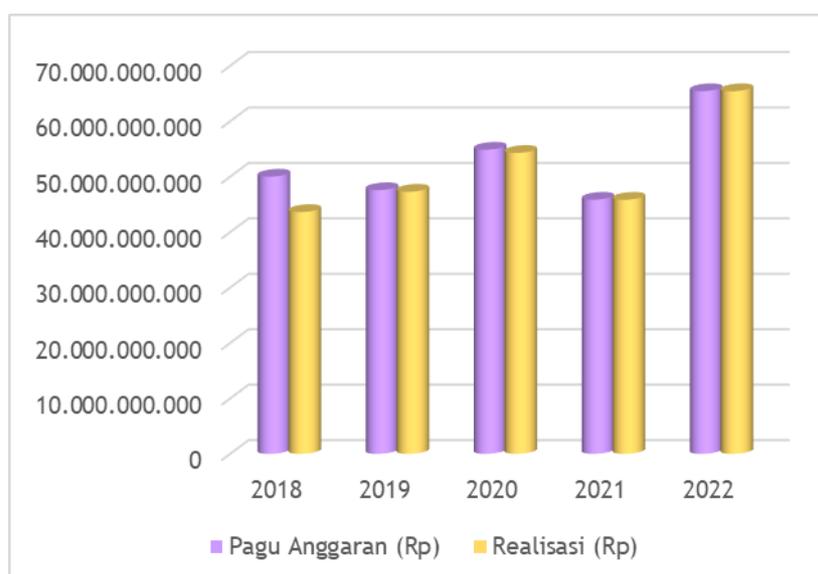
Perkembangan pagu anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan selama rentang waktu tahun 2015-2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3. 48 Perkembangan Anggaran Tahun 2018-2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (%)
2018	50.003.832.000	43.620.371.419	87,23
2019	47.569.996.000	47.281.079.874	99,39
2020	54,858,322,000	54,286,203,925	98.96
2021	45.843.217.000	45.831.591.266	99,97
2022	65.421.497.000	65.417.377.424	99,99

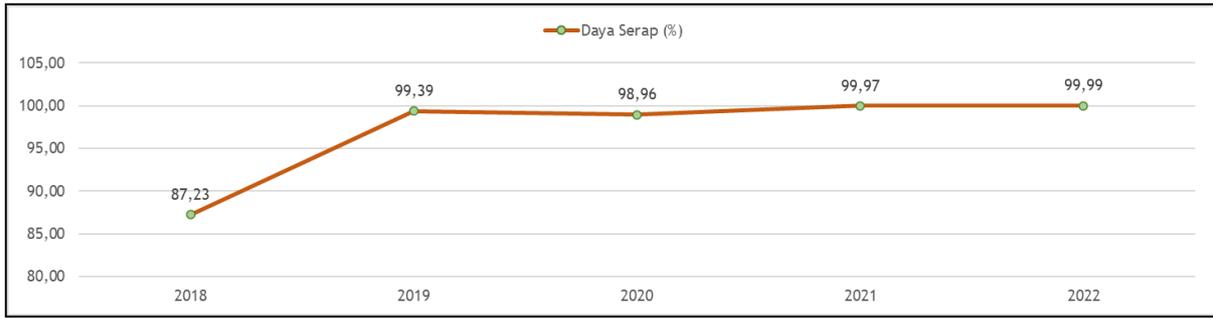
**) Catatan: Setelah dilakukan penghematan*

****) Setelah dilakukan penghematan dan self-blocking*



Gambar 3. 7 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2018 - 2022

Selama kurun waktu lima tahun pagu anggaran tertinggi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp65.421.497.000.- dan telah terealisasi sebesar Rp65.417.377.424,- atau 99,99% dari total rencana anggaran (DIPA) yang merupakan realisasi tertinggi selama kurun waktu tersebut. Secara rinci perkembangan daya serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dapat dilihat pada Gambar 3.11. di bawah ini:

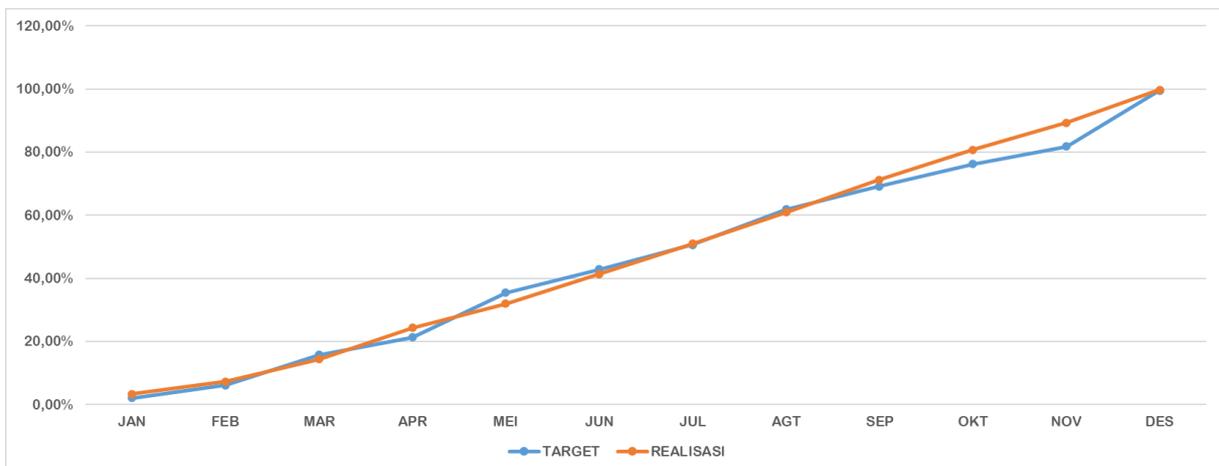


Gambar 3. 8 Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2018-2022

Penyerapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 lebih optimal apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh komitmen dan konsistensi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antara masing-masing pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2022 berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp72.869.932.000,-. Pada bulan Juli dalam rangka optimalisasi kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2022 terdapat revisi anggaran pada anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sehingga anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 menjadi sebesar Rp69.865.636.000,-. Setelah pengesahan realokasi anggaran ke Babun, DIPA akhir Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menjadi Rp65.421.497.000,-. Rincian anggaran meliputi anggaran belanja pegawai sebesar Rp30.945.758.000,-, belanja barang Rp31.929.656.000,-, dan belanja modal sebesar Rp2.546.083.000,-.

Penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar Rp65.417.377.424,- (99,99%), dengan rincian realisasi per jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp30.943.391.058,- (99,99%), belanja barang sebesar Rp31.927.909.578,- (99,99%), belanja modal Rp2.546.076.788,- (99,99%). Berikut gambar grafik perbandingan rencana penarikan dana revisi akhir dengan realisasi keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022:



Gambar 3. 9 Kurva S - Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Setbadan Litbang

III.3.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022 perolehan pagu anggaran revisi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebesar Rp65.421.497.000,- dan direncanakan target daya serap sebesar 99,54% dengan realisasi daya serap anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebesar 99,99%. Kondisi pagu anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.18. di bawah ini:

Tabel 3. 49 Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2022

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp,-)
Belanja Pegawai	30.945.758.000
Belanja Barang	31.927.909.578
Belanja Modal	2.546.083.000
Total	65.421.497.000

Sumber: Bagian Keuangan dan BMN, 2022

III.3.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap Tahun 2022

Capaian daya serap anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 tercatat sebesar 99,99% atau Rp65.417.377.424,- dan sisa anggaran yang tidak terserap dari pagu akhir adalah sebesar Rp4.119.576,- (0,006%). Realisasi daya serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 per-jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 50 Capaian Daya Serap Kegiatan Tahun 2020

JENIS BELANJA	PAGU (Rp,-)	REALISASI (Rp,-)	PENYERAPAN
Belanja Pegawai	30.945.758.000	30.943.391.058	99,9924%
Belanja Barang	31.929.656.000	31.927.909.578	99,9945%
Belanja Modal	2.546.083.000	2.546.076.788	99,9998%
Total	65.421.497.000	65.417.377.424	99,9998%

Sumber: Bagian Keuangan dan BMN, 2022

Secara lengkap perkembangan pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi termasuk realisasi dan penyerapannya berdasarkan output kegiatan disajikan dalam Matriks Laporan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 pada **Lampiran II**.

III.3.3. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Tahun 2022

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2022 dalam mendukung ketercapaian IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, secara rinci dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3. 51 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI			
	PAGU (Rp,-)	REALISASI (Rp,-)	SISA (Rp,-)	PROSENTASE REALISASI
IKK 1	600.793.000	600.789.880	3.120	99,9995
IKK 2	576.557.000	576.553.721	3.279	99,9994
IKK 3	3.085.752.000	3.085.737.600	14.400	99,9995
IKK 4	4.506.389.000	4.506.373.632	15.368	99,9997
IKK 5	4.296.628.000	4.296.615.920	12.080	99,9997
IKK 6	37.646.227.000	37.643.810.591	2.416.409	99,9936
IKK 7	11.094.458.000	11.092.828.196	1.629.804	99,9853
IKK 8	280.431.000	280.429.190	1.810	99,9994
IKK 9	796.886.000	796.883.330	2.670	99,9997
IKK 10	346.211.000	346.207.933	3.067	99,9991
IKK 11	2.191.165.000	2.191.147.431	17.569	99,9992

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Eselon II Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi kepada Badan Kebijakan Transportasi atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kebijakan Transportasi dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Secara umum pencapaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Seluruh indikator kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah melampaui target sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi I Tahun 2022. Pencapaian rata-rata Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 untuk 11 indikator kinerja kegiatan, yaitu sebesar **108,54%**.

IV.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada tahun 2022, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi secara dinamis telah melakukan perbaikan dengan mengedepankan koordinasi yang baik antar seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Beberapa identifikasi perbaikan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 17 Tahun 2022 maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan Dokumen Perencanaan di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi hingga ke dokumen perencanaan Badan Kebijakan Transportasi maupun Kementerian Perhubungan;
2. Di setiap persiapan pelaksanaan kegiatan para penanggung jawab kegiatan perlu melakukan perencanaan penyusunan target kegiatan dan anggaran yang lebih baik dan mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan kebijakan apabila terjadi kebutuhan revisi DIPA yang akan mempengaruhi capaian dan kualitas kinerja program.

L A M P I R A N

Lampiran 1

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2022				CAPAIAN KINERJA
							TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi	IKK 1	Indeks Kelembagaan	Nilai	79,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	73	-	-	-	81,76	112,00
			IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Nilai	0,92	-	-	-	0,93	101,14
		IKK 4	Indeks Perencanaan	Nilai	82	100	100	100	100	121,95	
		IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	70	-	-	-	76,80	109,71	
		IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan	Nilai	86,20	57,49	66,69	85,74	92,28	107,05	
		IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	72	0	0	75,92	76,44	106,17	
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	0	3	3	3	100,00	

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2022				CAPAIAN KINERJA
							TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
		Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan	%	85	-	-	-	100	0,00
		Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	92	58,33	77,78	88,89	100	108,70
			IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi P	%	70	4,00	1,53	34,15	70,73	101,04
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA											108,54%

Keterangan : Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri*

Lampiran 2

**REKAPITULASI REALISASI DAYA SERAP SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	UNIT KERJA	JENIS BELANJA									TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)
		PEGAWAI			BARANG			MODAL					
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)			
TRIWULAN I (PERIODE: JANUARI S/D MARET) TAHUN 2022													
1	SetBadan Kebijakan Transportasi	38.158.669.000	6.818.672.550	17,87	32.165.180.000	6.053.445.187	18,82	2.546.083.000	23.085.000	0,91	72.869.932.000	12.895.202.737	17,70
TRIWULAN II (PERIODE: APRIL S/D JUNI) TAHUN 2022													
1	SetBadan Kebijakan Transportasi	38.158.669.000	18.863.364.450	49,43	32.165.180.000	16.279.554.021	50,61	2.546.083.000	578.773.330	22,73	72.869.932.000	35.721.691.801	49,02
TRIWULAN III (PERIODE: JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN 2022													
1	SetBadan Kebijakan Transportasi	35.154.373.000	23.707.330.995	67,44	32.165.180.000	22.619.725.732	70,32	2.546.083.000	1.742.504.906	68,44	69.865.636.000	48.069.561.633	68,80
TRIWULAN IV (PERIODE: OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN 2022													
1	SetBadan Kebijakan Transportasi	30.945.758.000	30.943.391.058	99,99	31.929.656.000	31.927.909.578	99,99	2.546.083.000	2.546.076.788	99,99	65.421.497.000	65.417.377.424	99,99